

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUH PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MAJENE**

TESIS

MAHFUDH

4617104080



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

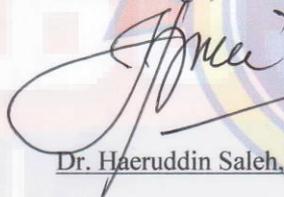
1. Judul : Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene
2. Nama : MAHFUDH
3. NIM : 4617104080
4. Program Studi : Manajemen

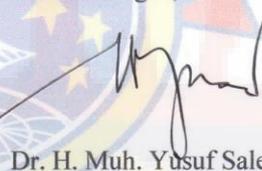
Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal2021
Dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Haeruddin Saleh, SE, M.Si

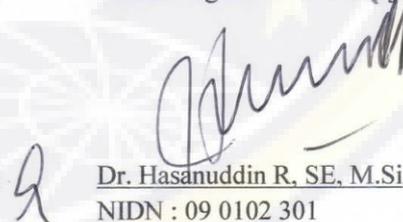

Dr. H. Muh. Yusuf Saleh, SE, M.Si

Mengetahui :

Direktur Program Pascasarjana,

Ketua Program Studi Manajemen,


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si
NIDN : 09 1301 740


Dr. Hasanuddin R, SE, M.Si
NIDN : 09 0102 301

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari / tanggal : Jum'at/ 26 Pebruari' 2021

Tesis atas nama : MAHFUDH

NIM : 4617104080

Telah Diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister pada Program Studi Manajemen.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr. Haeruddin Saleh, SE, M.Si. (.....)

(Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE, M.Si (.....)

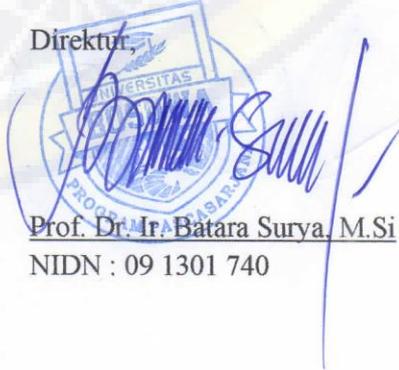
(Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1. Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si. (.....)

2. Dr. Seri Suriani SE., M.Si. (.....)

Makassar, 2021

Direktur,


Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

NIDN : 09 1301 740

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya menyatakan bahwa tesis yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar magister merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis ini yang saya kutip dari hasil karya orang yang telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi sesuai dengan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam tesis ini.

Majerte, 21 Februari 2021



MAHFUDH

NIM : 4617104080

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

AssalamuAlaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Maha suci Allah SWT dan segala puji hanya bagi-Nya berkat naungan dan ridho-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan proposal ini, sehingga dapat menyelesaikan proposal ini. Salam dan shalawat senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penelitian ini berjudul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene”**.

Penulis menyadari dari awal hingga akhir penyusunan penelitian ini tidak luput dari berbagai kekurangan, namun penulis berharap penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

Penyusunan tugas akhir ini tidak lepas dari berbagai macam hambatan dan tantangan. Namun semua dapat terlewati dengan baik atas bimbingan Allah SWT dan dukungan moril maupun materil dari keluarga dan pembimbing. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin memberikan ucapan terima kasih kepada keluarga dan para pembimbing atas dukungan dan arahan-arahannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Dan semoga karya ini bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Ucapan terima kasih yang tulus dari hati penulis kepada:

Ayahanda Mustakim dan Ibunda Nurmas

Yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, serta do'a untuk penulis.

Dr. Haeruddin Saleh, SE., M.Si.

Pembimbing I.

Dan

Dr. H. Muhammad Yusuf Saleh, SE., M.Si.

Pembimbing II.

Selaku dosen pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Selanjutnya tak lupa penulis haturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa.
2. Bapak Dr. Hasanuddin R, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Bosowa.
3. Bapak Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si. dan Ibu Dr. Seri Suriani, SE., M.Si. selaku penguji. yang senantiasa memberikan kritik dan saran selama proses penyusunan tugas akhir.
4. Ibu Dr. Miah Said, SE, M.Si. selaku Dosen Program Studi Manajemen yang senantiasa mengurus keperluan administrasi selama perkuliahan.
5. Sahabatku tercinta yang selalu memberikan bantuan, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

6. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Studi Manajemen angkatan 2018 atas doa dan motivasinya, kebersamaan dengan kalian merupakan kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Jatuh bangun bersama kalian akan menjadi kenangan terindah. Terima kasih atas persahabatan, doa dan dukungannya yang tak ternilai.
7. Seluruh pihak yang membantu penyelesaian tugas akhir ini, semoga menjadi pahala kebaikan bagi mereka untuk bekal pada hari kemudian kelak.

Majene, 21 Februari 2021

Penulis

Mahfudh

ABSTRAK

MAHFUDH. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.* (Dibimbing oleh Haeruddin Saleh dan H. Muhammad Yusuf Saleh)

Pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Oleh karena itu pendapatan asli daerah harus dikelola secara lebih profesional dan diharapkan dapat menunjang usaha peningkatan prekonomian, menjadi sumber pembiayaan pelaksanaan pemerintah dan pembangunan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan pendapatan asli daerah di kabupaten Majene pada tahun 2014-2018. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan tingkat kemaknaan 5% untuk setiap uji statistik.

Untuk mendapatkan hasil maka uji asumsi klasik semua terpenuhi. Penelitian ini telah menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama dan parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, variabel jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap pendapatan asli daerah. Faktor paling dominan terhadap penerimaan PAD Kabupaten Majene tahun 2014-2018 adalah pendapatan perkapita

Koefisien determinasi ganda R^2 di peroleh sebesar 0.853, artinya model yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 85.3 %, sedangkan sisanya 14.7 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian ini.

Saran-saran yang diajukan agar pemerintah daerah meningkatkan pendapatan sektor riil seperti pertanian, perdagangan, lembaga keuangan, jasa-jasa. Dengan penetapan tarif sesuai regulasi otonomi daerah dan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai maka pungutan retribusi pajak dapat diarahkan untuk meningkatkan pelayanan, memulihkan biaya, dan mengendalikan pelayanan dengan tetap mempertimbangkan aspek kemampuan masyarakat dan keadilan. Pemerintah daerah juga hendaknya tetap mampu mengendalikan pertumbuhan penduduk agar nantinya dapat terus berjalan seiringnya peningkatan pendapatan perkapita dengan pembukaan lahan pekerjaan di berbagai sektor perekonomian mikro maupun makro.

Kata Kunci: *Pendapatan Asli Saerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan dan Jumlah Penduduk*

ABSTRACT

MAHFUDH. (2021). *Analysis of Factors Affecting Regional Original Income at the Department of Finance and Regional Assets of Majene Regency.* (Guided by Haeruddin Saleh and H. Muhammad Yusuf Saleh)

Regional income is expected to be able to make a significant contribution to the Regional Revenue and Expenditure Budget. Therefore, regional revenue must be managed in a more professional manner and it is hoped that it can support efforts to improve the economy, become a source of financing for governance and development. The aims of this research is to determine the effect of per capita income, the number of companies and total population income received from the area in Majene Regency in 2014-2018. The analytical tool used is multiple linear regression with a significance level of 5% for each statistical test.

To get the results, all the classical assumption tests were fulfilled. The results of this research indicate that the independent variables jointly and partially have a significant effect on the dependent variable. The research hypothesis showed that the per capita income variable had a positive and statistically significant effect, the population variable had a positive and statistically significant effect, the number of companies variable had a positive and statistically significant effect on regional original income. The most dominant factor in the revenue of Regional Original Income Majene Regency in 2014-2018 is income per capita

The coefficient of multiple determination R^2 is 0.853, the meaning is the model used in this study showed that the independent variable was only able to explain the dependent variable by 85.3 %, while the remaining 14.7 % was explained by other variables outside of this study model.

The suggestions are put forward for local governments to increase real sector revenues such as agriculture, trade, financial institutions, services. By setting rates in accordance with regional autonomy regulations and in accordance with the targets to be achieved, tax collection could be directed to improve services, recover costs and control services while still paying attention to aspects of community capacity and justice. The governments must also be able to control population growth so that in the future it can continue to be in line with the increase in per capita income by creating jobs in various micro and macro economic sectors.

Keywords: *Reginoal Original Income, Percapita Income, Number of Companies and Population*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACK	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Keuangan Daerah	11
B. Potensi Keuangan Daerah	12
C. Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah	17
D. Pendapatan Asli Daerah	30
E. Faktor Yang Berpengaruh Terhadap PAD	36
F. Penelitian Terdahulu	43
G. Kerangka Pemikiran	45
H. Hipotesis Penelitian	45
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
B. Desain dan Jenis Penelitian	49
C. Metode Pengumpulan Data	50
D. Teknik Analisis Data	50
1. Analisis Deskriptif	51
2. Analisis Kuantitatif	51
E. Definisi Operasional Variabel	55
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian	56
B. Deskripsi Data Variabel	61
1. Variabel Penerimaan PAD	61

2. Variabel Pendapatan Perkapita	63
3. Variabel Jumlah Perusahaan	64
4. Variabel Jumlah Penduduk	66
C. Uji Asumsi Klasik.....	68
1. Uji Multikolinearitas.....	68
2. Uji Heterokedastisitas	69
3. Uji Normalitas.....	69
D. Analisis Regresi Linear Berganda	70
E. Pengujian Hipotesis	71
1. Pengujian Hipotesis 1	72
2. Pengujian Hipotesis 2	73
3. Pengujian Hipotesis 3	73
4. Pengujian Hipotesis 4	74
F. Koefisien Determinasi	74
G. Pembahasan Hasil Penelitian	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA	87
-----------------------------	-----------

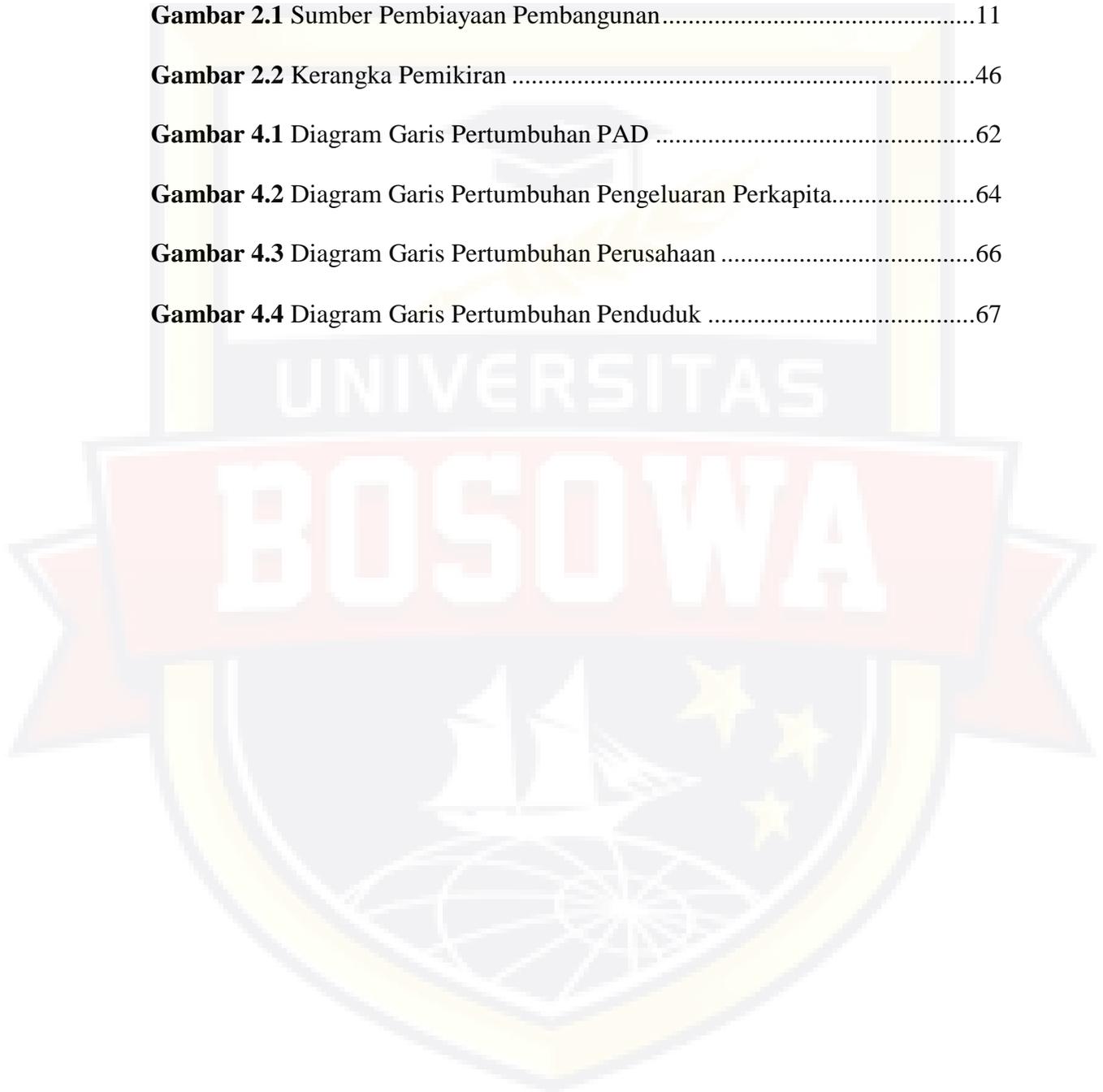
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan APBD Kabupaten Majene.....	4
Tabel 4.1 Pertumbuhan PAD Tahun 2014-2018	61
Tabel 4.2 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita.....	63
Tabel 4.3 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan	65
Tabel 4.4 Pertumbuhan Jumlah Penduduk	67
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Multikolinearitas	68
Tabel 4.6 Hasil Uji Glesjer	69
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Multikolinearitas	70
Tabel 4.8 Hasil Uji-t.....	72
Tabel 4.9 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2).....	75

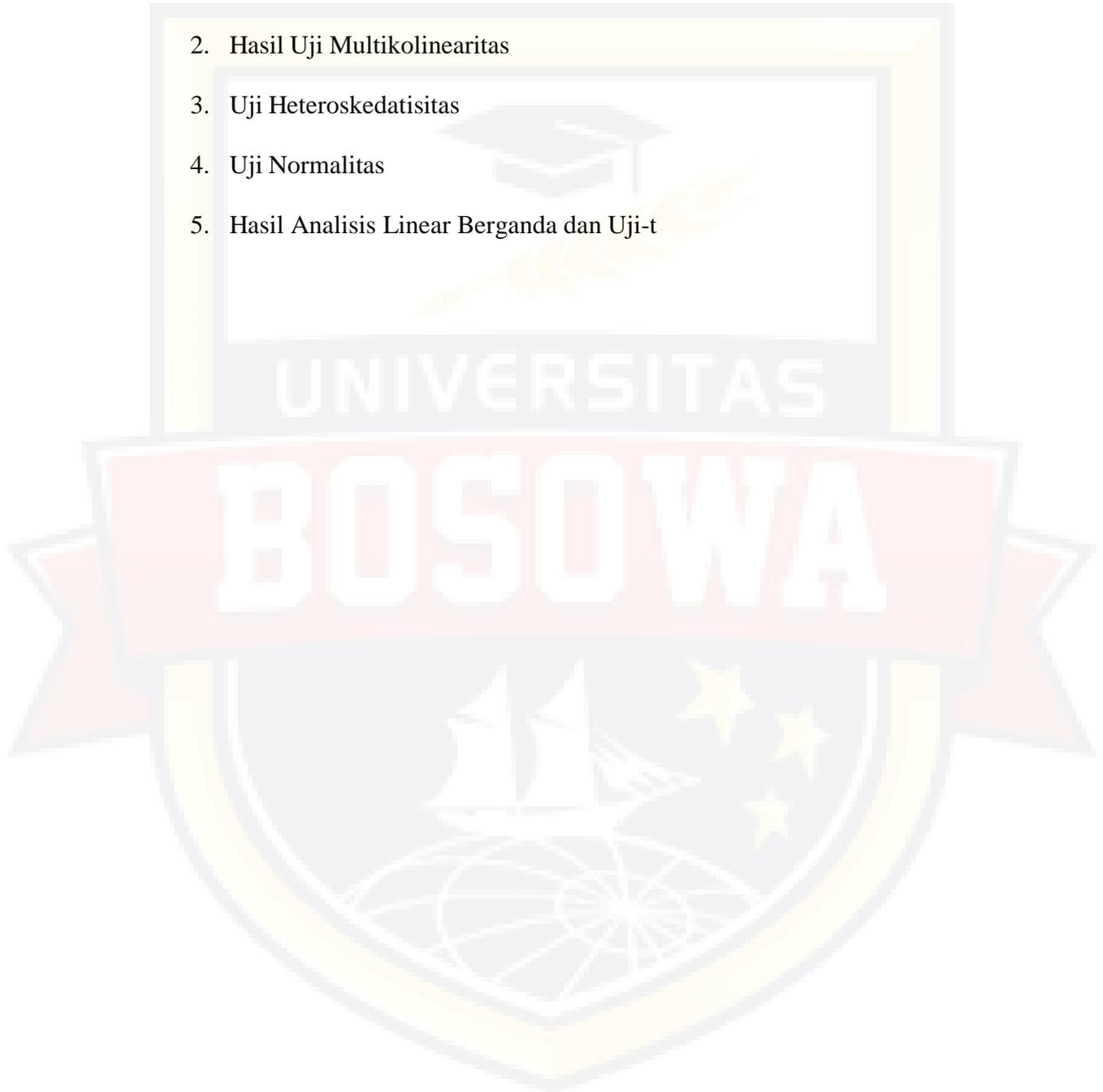
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Sumber Pembiayaan Pembangunan.....	11
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran	46
Gambar 4.1 Diagram Garis Pertumbuhan PAD	62
Gambar 4.2 Diagram Garis Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita.....	64
Gambar 4.3 Diagram Garis Pertumbuhan Perusahaan	66
Gambar 4.4 Diagram Garis Pertumbuhan Penduduk	67



DAFTAR LAMPIRAN

1. Tabulasi Data Penelitian
2. Hasil Uji Multikolinearitas
3. Uji Heteroskedastisitas
4. Uji Normalitas
5. Hasil Analisis Linear Berganda dan Uji-t



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari kegiatan ekonomi daerah itu sendiri. PAD merupakan salah satu pilar kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD Terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Penerimaan PAD bersumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku (Halim, 2004:96).

Otonomi daerah dan desentralisasi fisik ini mengharapakan pemerintah daerah memiliki kemandirian yang lebih besar dalam keuangan daerah, oleh karena itu, peranan PAD yang merupakan bagian dari Pendapatan Daerah sangat menentukan kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja keuangan daerah yang banyak dilakukan saat ini antara lain dengan melihat rasio antara PAD dengan total pendapatan daerah pada APBD. Prinsipnya, semakin besar sumbangan PAD kepada APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Nyatanya, dalam penyelenggaraan otonomi daerah banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat

dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini dimana porsi antara PAD dengan sumbangan pemerintah pusat sangat besar sehingga dapat dipastikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia memiliki PAD yang sangat kecil dalam membelanjai kebutuhan daerahnya.

Menurut Prana (2016), berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu pelaksanaannya bergantung pada kemampuan ekonomi meliputi : pertama, tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat; kedua, bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. Daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan

kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Undang-Undang tersebut direvisi dan disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah direvisi yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Citra keuangan pemerintah daerah akan tercermin dari besarnya PAD yang diperoleh dan bagaimana alokasi keuangan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah untuk mensejahterahkan masyarakatnya. Untuk meningkatkan penerimaan PAD, pemerintah daerah perlu melakukan analisis potensi-potensi yang ada di daerah dan mengembangkan potensi tersebut sebagai pemasukan daerah. Pengembangan potensi akan menciptakan pendapatan asli daerah bagi yang berguna untuk melaksanakan tujuan pembangunan. Sehingga dalam proses menuju kemandirian sebuah daerah dalam bidang pembiayaan, pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah dalam bidang pembangunan akan mampu tercipta secara berkelanjutan. Akan tetapi kenyataannya ini tercermin dari peranan sumbangan atau kontribusi PAD terhadap Anggaran Pemerintah dan

Belanja Daerah (APBD) yang dirasa masih rendah, khususnya untuk PAD kabupaten/kota.

Permasalahan yang sama juga dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Majene, terkait peningkatan pembiayaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Sehingga peneliti berinisiatif melakukan riset di Kabupaten Majene dengan fokus penelitian tentang pengaruh pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap penerimaan PAD dengan menggunakan data sekunder periode 2014-2018. Sebagai data awal dari penelitian ini, berikut disajikan gambaran makro ekonomi terkait kebijakan keuangan.

Berdasarkan laporan hasil keuangan pemerintah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2018. Pemerintah Kabupaten Majene telah berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi, efisiensi biaya pungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Majene selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Sumber Penerimaan PAD Kabupaten Majene

Tahun	Realisasi PAD	Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah							
		Pajak Daerah	%	Retribusi Daerah	%	Laba BUMD & Aset Daerah	%	Lain-lain PAD yang Sah	%
2014	53.921	4.444	89,70	43.910	89,03	2.255	100	3.310	113,68
2015	45.231	5.634	92,48	12.086	91,90	2.655	100	120.625	98,89
2016	50.544	6.065	80,20	12.192	89,41	3.127	100	57.698	87,30
2017	83.238	6.763	93,88	13.489	87,78	3.345	100	59.639	93,56
2018	61.831	7.666	69,94	13.796	86,02	2.686	100	93.176	78,81

Sumber data : BPAD Kabupatene Majene (dalam milliaran rupiah), 2019

Dalam tabel 1.1 menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah tahun 2014-2018 dari pajak daerah sebesar 89,70% - 69,94, retribusi daerah sebesar 89,03% - 86,02%, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100%, lain-lain PAD yang sah sebesar 113,68% - 78,81%. Selama periode 5 (lima) tahun, anggaran Kabupaten Majene realisasi penerimaan pendapatan asli daerah bervariasi. Dengan nilai pendapatan pajak daerah terendah pada tahun 2018 sebesar 69,94% dan puncak tertinggi pada tahun 2017 sebesar 93,88%. Penurunan pendapatan asli daerah ini disebabkan lemahnya peningkatan pajak dan retribusi daerah. Dapat juga dilihat dari sumber pendapatan lain yang mengalami penurunan pada tahun 2018. Ini dikarenakan semakin rendahnya pendapatan perkapita masyarakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan semakin kecilnya jumlah perusahaan sehingga memberikan kontribusi kecil kepada pajak dan retribusi daerah.

Untuk melihat potensi sumber penerimaan suatu daerah sendiri (Provinsi/Kabupaten) dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor-faktor “Yang dapat dikendalikan” (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan), dan “yang tidak dapat dikendalikan”, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Beberapa faktor-faktor tersebut adalah : (1) Kondisi awal suatu daerah, (2) Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, (3) Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita riil, (4) Pertumbuhan penduduk, (5) Tingkat inflasi, (6) Penyesuaian tarif, (7) Pembangunan baru, (8) Sumber pendapatan baru, (9) Perubahan peraturan.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah. Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Pada hakikatnya retribusi daerah lebih beraneka ragam dan bervariasi antara daerah yang satu dengan yang lain. Semakin maju suatu daerah akan semakin banyak fasilitas atau jasa yang perlu disediakan untuk pemenuhan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat sehingga semakin banyak pula jasa-jasa retribusi yang dapat dipungut oleh daerah.

Untuk menilai sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan maka sangat diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan regional adalah suatu indikator berupa data agregat yang sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih memakai data tersebut untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. PDRB merupakan data statistik untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik di masa lalu maupun sekarang dan sebagai evaluasi, perencanaan, dan sasaran yang akan dicapai masa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto adalah merupakan nilai tambah bruto seluruh barang jasa yang tercipta atau dihasilkan secara domestic suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu priode tertentu tanpa

memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen (PDRB Kabupaten Majene, 2019:3).

Data PDRB ini diperlukan untuk mengetahui : (a) PDRB Harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dilakukan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang Besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya; (b) PDRB Harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju ekonomi secara keseluruhan atau setiap ekonomi dari tahun ke tahun; (c) Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis ekonomi suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Nasional Bruto (PNB) per satu orang penduduk; (e) PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pengetahuan nyata untuk ekonomi perkapita untuk penduduk suatu Negara. PDRB atas dasar harga dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi (PDRB Kabupaten Majene, 2019:4-5).

Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanya penggalan potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya perbaikan sangat diperlukan

terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar kemampuan daerah meningkat dalam membiayai penyelenggaraan urusannya sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian suatu daerah, diperlukan kontribusi khususnya pada perusahaan-perusahaan swasta dalam sumber lain-lain PAD yang sah. Namun, pemerintah daerah harus ikut dalam membuka pangsa pasar domestik dan internasional. Dengan kualitas dan kuantitas produk yang tinggi sehingga pangsa pasar yang dihasilkan dari produk akan lebih luas sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.

Pertambahan penduduk merupakan suatu hal yang dibutuhkan dan bukan suatu masalah, melainkan sebagai unsur penting yang dapat memacu pembangunan ekonomi (Nyoman dan Murjayanasa, 2017). Peningkatan jumlah penduduk akan berdampak pada peningkatan pendapatan, dalam hal ini PAD juga akan meningkat. Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas pendapatan daerah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asmurf, dkk (2015) menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD. Hal ini berarti semakin banyaknya jumlah penduduk maka PAD akan meningkat.

Berdasarkan teori klasik menjelaskan kaitan antara pendapatan perkapita dengan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan teori penduduk optimal. Dari teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan

penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita, maka pertambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita, akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil lebih yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi. Oleh karenanya pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Penduduk yang bertambah terus akan menyebabkan suatu jumlah penduduk tertentu produksi marginalnya sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai maksimal (Sadono Sukirno, 1999 : 431).

Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk meneliti dan lebih mencermati bagaimana pengaruh jumlah pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Majene tahun 2014-2018.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan perkapita mempengaruhi PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018 ?
2. Apakah jumlah perusahaan mempengaruhi PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018 ?
3. Apakah jumlah penduduk mempengaruhi PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018 ?

4. Faktor dominan apa yang berpengaruh antara pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.

2. Tujuan khusus

- a. Mengetahui pengaruh pendapatan perkapita terhadap PAD.
- b. Mengetahui pengaruh jumlah perusahaan terhadap PAD.
- c. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD.
- d. Mengetahui faktor dominan yang berpengaruh terhadap PAD.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi tentang PAD.
- b. Sebagai referensi dalam penelitian yang akan datang tentang PAD.
- c. Mengembangkan metodologi penelitian lebih lanjut tentang PAD.

2. Manfaat Praktis

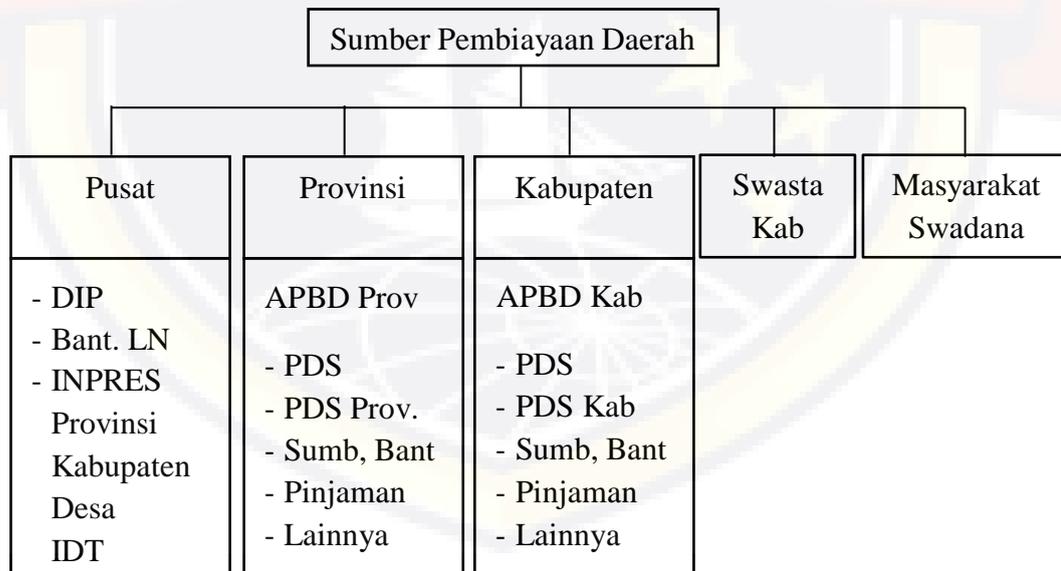
- a. Memberikan gambaran dan hasil pelaksanaan program, dan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten Majene.
- b. Merupakan bahan evaluasi dan masukan untuk selanjutnya dapat menentukan arah kebijakan dalam perencanaan daerah Kabupaten Majene.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah keseluruhan tatanan, perangkat, kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Keuangan yang berhasil akan dapat mengumpulkan dana dari masyarakat bagi pembiayaan pembangunan. Dengan demikian Pemda dapat menyediakan *social overhead capital* yang memadai. Keberadaan *social overhead capital* menentukan keberhasilan Negara dalam diversifikasi produk, perluasan perdagangan, mendukung perkembangan penduduk, pengentasan kemiskinan dan perbaikan kondisi lingkungan hidup. Bagi Pemda, sumber- sumber penerimaan ditunjukkan pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Sumber Pembiayaan Pembangunan.

Sumber : Modul Analisis Potensi Keuangan Daerah, Ditjen Otda Depdagri

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa untuk pemda provinsi dan kabupaten, sumber pembiayaan pembangunan bersumber dari daerah sendiri, pemerintah pusat, swasta (swasta murni atau kemitraan), dan swadana masyarakat. Sumber pembiayaan pembangunan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerah sendiri. Hal ini disebabkan karena sumber inilah yang merupakan wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.

B. Potensi Keuangan Daerah

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah sendiri (Provinsi/Kabupaten) dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa faktor-faktor “yang dapat dikendalikan” (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan), dan “yang tidak dapat dikendalikan”, (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah, beberapa faktor- faktor tersebut adalah :

1. Kondisi Awal Suatu Daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan : Pertama, besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan. Hal ini disebabkan karena struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik dalam kualitas dan kuantitas tertentu. Pada masyarakat agraris (daerah yang berbasis pertanian) misalnya, tuntutan akan ketersediaan

fasilitas pelayanan publik dalam kuantitas dan kualitas tertentu akan lebih rendah daripada tuntutan yang ada di masyarakat industri (daerah yang berbasis industri). Dalam masyarakat agraris seperti ini, pemerintah tidak akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan dari masyarakat, sementara pada masyarakat industri, pemerintah akan terpacu untuk menarik pungutan-pungutan untuk memenuhi tuntutan akan ketersediaan fasilitas pelayanan publik tersebut. Kedua, Struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Karena perbedaan pada struktur ekonomi dan sosialnya, kemampuan membayar segala pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah akan lebih tinggi di masyarakat industri dari pada masyarakat agraris. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa pengetahuan akan kondisi awal suatu daerah sangat menentukan potensi sumber penerimaan daerah. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan:

- a. Komposisi industri yang ada di daerah.
- b. Struktur sosial, politik dan institusional serta berbagai kelompok masyarakat yang relatif memiliki kekuatan.
- c. Kemampuan (kecakapan) administratif, kejujuran dan integritas dari semua cabang-cabang perpajakan pemerintah.
- d. Tingkat ketimpangan (ketidakmerataan) dalam distribusi pendapatan.

Indikator sederhana untuk melihat kondisi awal suatu daerah ini adalah dengan melihat kontribusi sektor pertanian dan atau kontribusi

sektor industri pada PDRB suatu daerah. Semakin tinggi kontribusi sektor industri pada PDRB suatu daerah maka akan semakin tinggi potensi penerimaan daerahnya. Sebaliknya semakin tinggi kontribusi sektor pertanian pada PDRB suatu daerah maka akan semakin rendah potensi penerimaan daerahnya.

2. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan.

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Dalam usaha peningkatan cakupan ini, tiga hal yang harus diperhatikan adalah :

- a. Menambah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi. Peningkatan cakupan pendapatan dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi.
- b. Meningkatkan besarnya penetapan. Dalam penelitian potensi pendapatan, perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya kesenjangan, yang disebabkan data potensi tidak tersedia dengan akurat sehingga besarnya penetapan pajak dan atau retribusi belum sesuai dengan potensi yang sebenarnya. Dalam rangka meningkatkan cakupan, perlu dideteksi adanya kebocoran dan mengevaluasi kembali besarnya penetapan serta estimasi terhadap besarnya potensi. Sistem dan prosedur pemungutan perlu dipelajari dengan seksma bila perlu dengan bantuan auditor yang berpengalaman.

c. Mengurangi tunggakan. Peningkatan cakupan dapat dilakukan dengan mengurangi besarnya tunggakan. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tunggakan rekening, kemudian diambil langkah-langkah kongkrit untuk mengurangi tunggakan yang ada maupun mencegah terjadinya tunggakan baru. Dalam hal ini diperlukan adanya penyelenggaraan administrasi tunggakan yang lengkap dan rapi.

3. Perkembangan PDRB Perkapita Riil.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu yang tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah (Provinsi/Kabupaten), semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan pemerintahnya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah (Provinsi/Kabupaten) semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

4. Pertumbuhan Penduduk

Dalam hal tertentu, besarnya pendapatan dapat dipengaruhi langsung oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat. Tetapi pertumbuhan penduduk mungkin tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

5. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan, misalnya pajak pembangunan I dan PBB. Pada pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada tarif secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

6. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak, retribusi atau leges yang tarifnya ditentukan secara tetap (flat), maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan untuk menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan daerah. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi, perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan pendapatan.

7. Pembangunan Baru

Penambahan pendapatan dapat juga diperoleh bila pembangunan-pembangunan baru ada, seperti misalnya pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah dan lain-lain.

8. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya, usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer dan lain-lain.

9. Perubahan Peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak dan atau retribusi, jelas akan meningkatkan pendapatan daerah.

C. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dalam era otonomi daerah ini, bentuk hubungan keuangan Pemerintah Pusat dan daerah terdiri dari dari :

1. Desentralisasi;
2. Dekonsentrasi
3. Tugas pembantuan; dan
4. Pinjaman daerah.

1. Desentralisasi Fiskal

Sejalan dengan tuntutan demokratisasi dalam bernegara, penyelenggaraan pemerintahan juga mengalami perubahan. Sistem pemerintahan yang semula lebih condong pada sentralisasi menjadi desentralisasi. Selaras dengan perubahan sistem tersebut, maka tata aturan juga mengalami perubahan yang lebih mengarah kepada penyempurnaan pelaksanaan otonomi daerah, melalui pemberian kewenangan yang seluas-luasnya dengan tetap menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berbagai penyempurnaan dilakukan seperti yang tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2004, yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 25 Tahun 1999, dengan pokok-pokok perubahan bahwa penyediaan sumber-sumber pendanaan untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan kewenangan pemerintah, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur melalui perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, yang berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan.

Hakikat penyempurnaan utamanya menjaga prinsip *money follows function*, artinya pendanaan mengikuti fungsi-fungsi pemerintahan sehingga kebijakan perimbangan keuangan mengacu kepada 3 prinsip yakni (1) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah merupakan subsistem keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; (2) Pemberian sumber keuangan negara kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskal; dan (3) Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan. Mempertegas perimbangan keuangan sebagai unsur utama dalam kebijakan desentralisasi fiskal, maka pelaksanaan tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara, yakni UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan acuan dasar pelaksanaan UU Nomor 33 Tahun 2004, khususnya pengaturan komponen dana perimbangan yang terdiri atas DBH, DAU dan DAK.

Apabila dibandingkan dengan pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 1999, maka penyempurnaan yang dimuat dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 antara lain (1) DBH Pajak, yang meliputi DBH PBB dan DBH BPHTB, ditambah dengan DBH PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPOPDN); (2) DBH SDA kehutanan, dengan mengakomodir dana reboisasi, yang semula merupakan DAK-DR; dan (3) DBH SDA, yang meliputi SDA minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan dan perikanan, ditambahkan dengan DBH Panas Bumi. Pelaksanaan kebijakan perimbangan keuangan dalam tatanan keuangan negara yang semula termasuk dalam kategori belanja ke daerah juga disempurnakan secara bertahap. Penyempurnaan tersebut meliputi pola pembagian DBH yang lebih transparan dan akuntabel, penyempurnaan formulasi DAU yang dilakukan secara konsisten dan mengarah kepada

fungsi pemerataan kemampuan keuangan daerah, serta penyempurnaan terhadap penerapan kriteria penentuan DAK.

Selain itu, penyempurnaan juga dilakukan untuk memenuhi ketentuan perbendaharaan negara, sehingga sejak tahun 2008 sebagai pelaksanaan pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah, belanja ke daerah dikategorikan sebagai transfer ke daerah. Dengan demikian, diharapkan arah kebijakan desentralisasi fiskal dalam pelaksanaannya menjadi lebih terukur sebagai capaian kinerja, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Pemerintah pusat juga memberikan perhatian yang besar terhadap sumber PAD. Hal ini dimaksudkan agar daerah dapat memungut sumber-sumber pendapatannya secara optimal sesuai dengan potensi tiap-tiap daerah. Namun, pelaksanaan pemungutannya tidak boleh menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan tetap menciptakan iklim yang kondusif bagi para investor.

Dalam hubungan ini, Pemerintah dan DPR saat ini sedang melakukan perubahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk memperkuat *taxing power* daerah dan meningkatkan kepastian hukum di bidang perpajakan daerah. Sumber-sumber PAD yang sebagian besar terdiri atas pajak daerah dan retribusi daerah diatur oleh undang-undang tersendiri, yang memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memungut pajak dan retribusi. Dalam undang-undang tersebut juga

diatur jenis-jenis pajak dan retribusi yang dipungut provinsi dan kabupaten/kota, sehingga dapat dihindari adanya tumpang tindih pemungutan pajak atau satu objek pajak dikenai dua atau lebih pungutan pajak. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat pendanaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Namun, apabila APBD mengalami defisit, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman. Pelaksanaan pinjaman daerah harus mengikuti kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti pemerintah daerah tidak dapat melakukan pinjaman langsung ke luar negeri, jumlah pinjaman tidak boleh lebih dari 75 persen penerimaan umum APBD, *Debt Service Coverage Ratio* paling sedikit 2,5 persen.

Dalam pengelolaan keuangan, daerah diberikan keleluasaan, sehingga dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhan daerah dengan tetap mengacu pada peraturan perundangan. Hal ini sejalan dengan alokasi dana transfer pemerintah pusat yang sebagian besar telah diberikan diskresi sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Namun, dalam mengelola keuangannya, daerah harus melakukan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah yang menjadi hak dan kewajiban harus diadministrasikan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah selain dilakukan secara efektif dan efisien diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah daerah

yang baik bersandarkan pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam pengelolaan keuangan daerah, telah dilakukan juga perubahan yang cukup mendasar antara lain mengenai bentuk dan struktur APBD, anggaran berbasis kinerja, klasifikasi anggaran, dan prinsip-prinsip akuntansi.

a) Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur secara komprehensif dan terpadu (*omnibus*

regulation) ketentuan-ketentuan dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dengan mengakomodasi berbagai substansi yang terdapat dalam berbagai undang-undang di atas. Dengan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah, diharapkan dapat mengharmoniskan pengelolaan keuangan daerah, baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta antara pemerintah daerah dan DPRD, ataupun antara pemerintahan daerah dan masyarakat. Dengan demikian, daerah dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien, serta dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, berdasarkan tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, proses dan mekanisme penyusunan APBD dapat memperjelas jenjang tanggung jawab, baik antara pemerintah daerah dan DPRD, maupun di lingkungan internal pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah juga menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh tiap-tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas, tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan), dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Dalam hal ini, penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya. Aspek lainnya yang penting adalah keterkaitan antara kebijakan perencanaan dengan penganggaran oleh pemerintah daerah sedemikian rupa, sehingga sinkron dengan berbagai kebijakan Pemerintah. Di samping itu, dari sisi pelaksanaan APBD telah diatur mengenai pemberian peran dan tanggung jawab pengelola keuangan, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka menguatkan pilarakuntabilitas dan transparansi.

b) Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Akhir tahun 2018 yang lalu, usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah genap 18 tahun. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di era Reformasi secara resmi dimulai sejak 1 Januari 2001. Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pidato penjelasan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Nota Keuangan 2019 dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Presiden Jokowi menjelaskan, belanja negara 2019 akan diarahkan salah satunya pada upaya penguatan desentralisasi fiskal yang ditandai dengan perencanaan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2019 sebesar Rp. 832,3 triliun. Jumlah tersebut meningkat 9 persen dari perkiraan realisasi di tahun 2018 atau meningkat 45,1 persen dari realisasinya di tahun 2014 sebesar Rp. 573,7 triliun. Transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ini terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi

Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam, dan Dana Otoritas Khusus. Dengan jumlah sebesar itu artinya Pemerintah telah menaruh kepercayaan tinggi bagi daerah untuk secara mandiri menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya di semua bidang kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan.

Namun kondisi yang diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan. Keadaan tersebut membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, ketergantungan daerah terhadap TKDD masih sangat tinggi. Secara rata-rata nasional, ketergantungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1%. Sementara, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Nugrha (2019).

2. Dekonsentrasi

Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Provinsi. Dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan adalah dinas Provinsi sebagai perangkat Pemerintah Daerah Provinsi. Latar belakang adanya dekon ini karena ada kegiatan-kegiatan yang menjadi wewenang Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah. Otonomi daerah

“mengharuskan” Pemerintah Pusat menyerahkan tugas-tugas kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain seperti diatur dalam pasal 7 ayat 2 UU 22/1999. Karena Pemerintah Pusat sudah tidak mempunyai instansi vertikal di daerah maka wewenang melaksanakan kegiatan tersebut dilimpahkan ke daerah. Sesuai dengan pengertiannya, karena wewenang tersebut sebenarnya merupakan wewenang Pemerintah Pusat, maka pendanaan atas pelaksanaan wewenang tersebut merupakan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan dengan sendirinya bersumber dari APBN. Sebagai konsekuensinya, jika dikemudian hari kegiatan menghasilkan pendapatan maka pendapatan itu menjadi hak Pemerintah Pusat dan dipertanggungjawabkan melalui APBN. Penugasan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan melalui dekonsentrasi antara lain fasilitasi kerja sama dan penyelesaian perselisihan antar Daerah dalam wilayah kerjanya, penciptaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas umum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan sebagainya. Dalam perkembangannya, hingga saat ini bentuk hubungan dekonsentrasi ini belum dapat benar-benar dilaksanakan. Pemerintah Pusat melalui departemen teknis masih melakukan kewenangannya dengan apa yang disebut Unit Pelaksana Teknis/UPT yang ada di daerah. Alasan untuk “memaklumi” hal tersebut memang ada

di antara dua hal ini, yaitu daerah yang masih belum siap atau ketidaksiapan departemen teknis untuk menyerahkan wewenang itu.

3. Tugas Pembantuan

Walaupun terpisah, bisa dikatakan bahwa bentuk hubungan tugas pembantuan mirip dengan dekonsentrasi, hanya yang menjadi sasaran Pemerintah Pusat ini adalah Pemerintah Daerah dan Desa serta sifatnya bukan pelimpahan kewenangan tapi penugasan. Disamping itu, pihak yang memberikan tugas pembantuan tidak terbatas dari Pemerintah Pusat tapi bisa berasal dari tingkatan pemerintah di atasnya seperti dari Pemerintah Provinsi ke Kabupaten atau Kabupaten ke Desa. Dalam hal kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemda/Desa berasal dari Pemerintah Pusat, maka dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan dimaksud berasal dari APBN. Sebagai akibatnya, bilamana ada pendapatan yang berasal dari kegiatan tersebut, maka pendapatan itu juga harus mengalir ke Pemerintah Pusat. Seperti halnya dengan dekonsentrasi, pelaksanaan tugas pembantuan hingga saat ini belum berjalan sesuai dengan amanat PP 106/2000.

4. Pinjaman Daerah

Bentuk hubungan yang terakhir ini berbeda dengan dua bentuk di atas dalam hal sumber pembiayaannya. Untuk membiayai kebutuhan Daerah berkaitan dengan penyediaan prasarana yang dapat menghasilkan (pengeluaran modal), Daerah dapat melakukan pinjaman baik dari dalam negeri (Pemerintah Pusat dan Lembaga Keuangan) maupun dari luar

negeri dengan persetujuan dan melalui Pusat. Sumber pinjaman bisa berasal dari sumber di luar keuangan negara, yaitu jika pinjaman berasal dari lembaga swasta atau masyarakat langsung. Penggunaan :

- a) Pinjaman jangka panjang digunakan membiayai pembangunan prasarana yang akan menjadi aset Daerah. Selain memberikan manfaat bagi pelayanan umum, diharapkan aset itu juga dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran pinjaman;
- b) Pinjaman jangka pendek, hanya dapat dilakukan dalam rangka pengelolaan kas Daerah yang sifatnya hanya untuk membantu likuiditas.

Kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri (penerusan pinjaman) dalam kerangka desentralisasi fiskal saat ini merupakan permasalahan yang mendesak dan perlu segera diselesaikan, mengingat hal-hal berikut :

- a) Sebagian besar perjanjian pinjaman luar negeri untuk Pemerintah Daerah telah ditandatangani, namun belum dapat disalurkan karena mekanisme-nya belum diatur secara jelas;
- b) Sebagian proyek-proyek pinjaman sedang berjalan (on-going);
- c) Mekanisme untuk repayment/disbursement terhadap pokok pinjaman, bunga dan resiko terhadap perubahan nilai kurs (*foreign ex-change risk*) belum diatur secara rinci;
- d) Jaminan terhadap pinjaman daerah masih belum jelas;
- e) Akuntabilitas terhadap pemanfaatan pinjaman daerah belum jelas.

Guna penyelesaian permasalahan on-lending, Pemerintah segera mengantisipasi dengan mengambil langkah-langkah penyelesaian berikut:

- a) Merumuskan kebijakan Pemerintah terhadap pinjaman luar negeri dalam kerangka desentralisasi fiskal; dan
- b) Menyusun “mapping” kapasitas Daerah untuk melakukan pinjaman.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU RI, No. 33 Tahun 2004 Sebagai perubahan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang menjadi sumber-sumber pendapatan untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari :

Setiap pemungutan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah harus berdasarkan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang, Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Kebijakan dalam rangka peningkatan PAD ditempuh dengan rasionalisasi sistem dan prosedur, law enforcement pengawasan yang efektif, kemudahan pelayanan, sehingga tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Peningkatan penerimaan bagian atau laba atas penyertaan modal dan investasi daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

- a. Hasil pajak daerah;
- b. Hasil Retribusi daerah;
- c. Hasil perusahaan milik daerah;
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Dana Perimbangan

Berpedoman pada pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dana perimbangan pusat dan daerah terdiri dari :

- a. Bagi hasil (bagian daerah) dari pajak bumi dan bangunan, bea peralihan hak atas tanah dan bangunan dan penerimaan sumber daya alam;
- b. Dana alokasi umum;
- c. Dana alokasi khusus.

3. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Bersumber dari dana darurat untuk penanggulangan bencana alam yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun lembaga hibah yang berdasarkan perjanjian hibah daerah yang disetujui DPRD dan harus memiliki kemanfaatan yang optimal; sumbangan pihak ketiga.

Sumber pendapatan tersebut diharapkan menjadi sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat.

Mengenai pengenaan pajak daerah, dan retribusi daerah atas penyediaan jasa, pemerintah daerah telah menyederhanakan berbagai jenis retribusi berdasarkan penggolongan jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, Pajak daerah terdiri dari:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak perusahaan sarang burung walet.

Sedangkan Retribusi daerah dibagi atas 3 golongan yaitu :

1. Retribusi jasa umum;
2. Retribusi jasa usaha;
3. Retribusi perijinan tertentu.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
- b. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri dari :

- 1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan;
- 2) Penerimaan jasa giro;
- 3) Penerimaan bunga deposito;
- 4) Tuntutan ganti kerugian daerah (TGR);
- 5) Pendapatan dari pengembalian.

1. Pajak Daerah

a. Timbulnya Pajak Daerah

Timbulnya pajak daerah dikarenakan adanya pelaksanaan desentralisasi yang menimbulkan daerah-daerah otonom yang membedakan kemungkinan bagi pelaksanaan asas tugas pembantuan.

Dengan keberadaan otonomi tersebut maka setiap daerah diberi hak dan wewenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk salah satunya adalah pengurusan tentang Pajak Daerah.

b. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2011:1), adalah sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

c. Ciri-ciri Pajak Daerah

Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukakan Kaho (2007: 130) adalah sebagai berikut:

- 1) Pajak daerah berasal dari pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.
- 2) Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang-Undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau peraturan hukum lainnya.
- 4) Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

d. Jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pajak daerah dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; dan Pajak Rokok

- 2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi merupakan pungutan resmi yang dilakukan Pemerintah. Pemerintah sering kali mengenakan retribusi pada permohonan izin tertentu. Hal tersebut secara normatif memang dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah

b. Ciri-ciri pokok Retribusi Daerah

- 1) Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum.
- 2) Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar.
- 3) Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.

- 4) Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.

c. Tolok Ukur menilai Pajak dan Retribusi Daerah

- 1) Hasil (*yield*)
- 2) Keadilan
- 3) Daya Guna Ekonomi
- 4) Kemampuan melayani
- 5) Kecocokan daerah sebagai sumber penerimaan daerah

E. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Potensi keuangan daerah adalah kekuatan disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan faktor-faktor yang dapat dikendalikan (yaitu faktor-faktor kebijakan dan kelembagaan) dan yang tidak dapat dikendalikan (variable-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber- sumber penerimaan daerah. Menurut (Wihana Kirana: 2002) beberapa faktor tersebut adalah :

a. Kondisi awal suatu daerah

Keadaan struktur ekonomi dan sosial suatu daerah menentukan : besar kecilnya keinginan pemerintah untuk menetapkan pungutan-pungutan, struktur ekonomi dan sosial suatu daerah juga menentukan kemampuan masyarakat untuk membayar segala pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah daerahnya. Kondisi awal ini mencakup pengetahuan akan : Komposisi industri yang ada didaerah, struktur sosial dan politik,

kemampuan administratif, tingkat ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

b. Peningkatan cakupan

Kegiatan ini merupakan upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan. Usaha peningkatan cakupan ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yang meliputi menambah objek atau subjek retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, mengurangi tunggakan.

c. Perkembangan PDRB

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Logika yang sama, pada tingkat distribusi pendapatan tertentu tetap, semakin tinggi PDRB perkapita riil, semakin besar pula kemampuan masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin.

Semakin tinggi PDRB perkapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

d. Pertumbuhan penduduk

Besarnya pendapatan dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Bila jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat tetapi pertumbuhan penduduk tidak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan secara proporsional.

e. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pajak atau retribusi yang penetapannya didasarkan pada omzet penjualan. Pada pajak atau retribusi

yang penetapannya didasarkan pada tariff secara flat, maka inflasi diperlukan dalam pertimbangan perubahan tarif.

f. Penyesuaian tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan pendapatan.

g. Pembangunan baru

Penambahan pendapatan diperoleh bila ada pembangunan baru. Misal Pembangunan pasar, pembangunan terminal.

h. Sumber pendapatan baru

Adanya kegiatan yang mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada.

Perubahan peraturan-peraturan baru yang berhubungan dengan pajak atau retribusi, akan meningkatkan pendapatan daerah.

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

a) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB Adhb) adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah (region). Yang dimaksud Nilai Tambah yaitu merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi sebagai input antara. Nilai yang ditambahkan ini sama dengan balas jasa atas ikut sertanya faktor produksi dalam proses produksi. Nilai Tambah Bruto (NTB)

didapat dari Nilai Produksi (Output) dikurangi Biaya Antara (BA).

Dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{Nilai produksi (output)} - \text{biaya antara}$$

- 1) Komponen-komponen Nilai Tambah Bruto (NTB) antara lain : (i) Faktor pendapatan, terdiri dari : (a) Upah dan Gaji sebagai balas jasa pegawai, (b) Bunga modal sebagai balas jasa modal, (c) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah' (d) Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan; (ii) Penyusutan barang modal tetap; (iii) Pajak tidak langsung netto.
- 2) Nilai Produksi (Output) adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu. Barang dan jasa yang dihasilkan meliputi : (i) Produksi utama; (ii) Produksi ikutan, maupun; (iii) Produksi sampingan.
- 3) Biaya Antara (BA) adalah jenis biaya yang terdiri dari barang tidak tahan lama dan jasa yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan barang tidak tahan lama adalah barang yang mempunyai suatu perkiraan umur penggunaan kurang dari 1 tahun.
- 4) Produk Domestik Regional Netto (PDRN) Adhb, perbedaan antara konsep PDRN dan konsep PDRB adalah, jika PDRB masih terdapat nilai Penyusutan di dalamnya, sedangkan untuk PDRN nilai penyusutan sudah dikeluarkan. Formulasinya sebagai berikut : $\text{PDRN Adhb} = \text{PDRB Adhb} - \text{Penyusutan}$

Sedangkan Penyusutan yang dimaksud disini adalah susutnya (ausnya) barang-barang modal yang terjadi selama barang modal tersebut ikut serta dalam proses produksi.

b) PDRN atas dasar biaya faktor (PDRN Adbf) adalah PDRN Adhb dikurangi pajak tidak langsung netto. Pajak tidak langsung berupa pajak penjualan, bea ekspor/impur, cukai dan lain-lain pajak, kecuali pajak pendapatan dan pajak perorangan. Biasanya pemerintah memberikan subsidi kepada unit-unit produksi, yang akhirnya mengakibatkan penurunan harga (contoh subsidi Pupuk, BBM, Obat dan lain-lain). Karena ada subsidi tersebut maka pajak tidak langsung netto merupakan pajak tidak langsung dikurangi subsidi tersebut. PDRN Adbf sebenarnya merupakan jumlah balas jasa faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu region (daerah/ wilayah). Jadi PDRN Adbf merupakan jumlah dari pendapatan yang berupa : (i) Upah dan Gaji sebagai balas jasa pegawai; (ii) Bunga modal sebagai balas jasa modal; (iii) Sewa tanah sebagai balas jasa tanah; (iv) Keuntungan sebagai balas jasa kewiraswastaan. Akan tetapi pendapatan yang dihasilkan tersebut diatas, tidak seluruhnya menjadi milik / pendapatan penduduk region tersebut, sebab ada pendapatan yang diterima oleh penduduk region lain.

c) Pendapatan Regional Netto adalah PDRN Adbf dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar region dan ditambah dengan pendapatan yang masuk dari region lain (nett export). Dengan kata lain

bahwa produk regional netto (pendapatan regional) adalah jumlah pendapatan yang benar-benar diterima oleh seluruh penduduk yang tinggal di region/ wilayah/ daerah di mana dia berdomisili.

d) PDRB (*income per capita*), bila pendapatan-pendapatan di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di daerah tersebut, maka akan diperoleh suatu PDRB :

$$a. \text{ PDRB adhb} = \frac{\text{PDRB adhb}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

$$b. \text{ PDRB adhk perkapita} = \frac{\text{PDRB adhk}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

$$c. \text{ Income perkapita} = \frac{\text{Pendapatan Regional}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

2. Jumlah Penduduk

Adalah individu-individu atau anggota rumah tangga yang bertempat tinggal tetap di wilayah domestik region (daerah) Kabupaten Majene. Kecuali : (i) Wisatawan asing (Wisman) dan Wisatawan Nusantara (Winus) yang tinggal di wilayah domestik daerah tersebut kurang dari 6 bulan yang bertujuan tidak menetap; (ii) Awak dari kapal laut dan awak kapal udara luar negeri atau luar region yang sedang masuk dok atau singgah di daerah region tersebut; (iii) Pengusaha asing dan pengusaha daerah lain yang berada di daerah tersebut kurang dari 6 bulan; (iv) Anggota Korps Diplomat, Konsulat, yang ditempatkan di wilayah domestik daerah tersebut; (v) Pekerja musiman yang bekerja di wilayah domestik, yang bekerja sebagai pekerja musiman saja; (vi) Pegawai Badan

Internasional/ Nasional yang bukan penduduk daerah tersebut yang melakukan misi kurang dari 6 bulan. Orang-orang tersebut diatas dianggap sebagai penduduk dari negara atau daerah di mana dia biasanya bertempat tinggal. (PDRB Kabupaten Majene 2019, 11).

3. Jumlah Perusahaan

Strategi pengembangan bisnis merupakan satu komponen yang penting dari perencanaan perekonomian daerah. Paling tidak ada sepuluh elemen dasar atau tehnik dasar yang secara normal dari pengembangan pusat bisnis, yakni :

- a) Pusat bantuan bagi usaha kecil, untuk menyediakan : (i) training manajemen; (ii) konsultasi; (iii) jasa penelitian untuk meningkatkan performance-nya dan (iv) membantu memperluas penyerapan angkatan kerja.
- b) Pusat teknologi dan bisnis.
- c) Sistem pemasaran secara kelompok. Faktor-faktor utama yang mendorong berdirinya operasi kelompok pemasaran adalah : (i) terbatasnya skala produksi; (ii) adanya distribusi dan pemasaran dalam skala besar; (iii) kebutuhan survive dari ancaman luar (penetrasi impor) dan (iv) sikap yang baik melalui kolaborasi.
- d) Perusahaan pembiayaan ventura.
- e) Pusat informasi bisnis. *commit to user*
- f) Program pengembangan dan kepariwisataan. Pada dasarnya kita mengenal tiga tipe wilayah berkaitan dengan sektor pariwisatanya,

yakni : (i) Daerah dimana sektor pariwisata relatif kecil; (ii) Daerah dimana secara nyata mempunyai potensi wisata tinggi dan (iii) Daerah dengan potensi wisata sedang/cukup.

- g) Penelitian dan pengembangan.
- h) Pusat-pusat inkubasi.
- i) Enterprise zone.
- j) Enterprenuer development activities.

Hal yang tak kalah penting hubungan dengan upaya pengembangan dunia usaha adalah masalah lingkungan ekonomi (iklim ekonomi). Pemerintah daerah sebagaimana sebuah rumah tangga dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Kuncinya adalah terletak pada peraturan dan kebijakan seperti apa yang akan mendorong pembangunan dunia usaha dan pada saat yang sama mempertahankan kualitas lingkungan agar tidak terjadi degradasi.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) digunakan referensi penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Miaragustia Mayza, Raja Mabar dan Muhammad Nasir (2015), dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi PAD Provinsi Aceh”, tujuan mengetahui Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Jumlah Penduduk, PDRB dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah, sampel data penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Keuangan Aceh (DKA) Provinsi Aceh, Dinas Pendapatan

dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, serta buku-buku pendukung, jurnal dan laporan tertulis lainnya. Berdasarkan Uji-F menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk, rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) dan inflasi secara bersama-sama mempengaruhi PAD, karena signifikansi berada dibawah 0,05. Hasil Uji-t menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk dan inflasi tidak berpengaruh terhadap PAD. Dari uji-t membuktikan bahwa variabel rasio (pengeluaran pemerintah/PDRB) berpengaruh terhadap PAD, dengan tingkat signifikansi $\alpha=0,05$ (5 %).

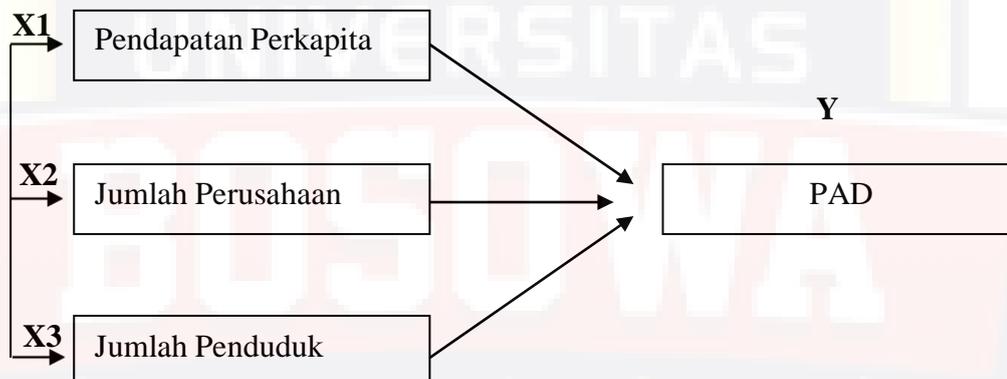
Penelitian yang dilakukan oleh Putu Adhi Guna Wijaya dan Ni Nyoman Yuliarmi (2019), dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD Kabupaten Badung”, tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh jumlah kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan asli daerah dengan model hubungan kasual menunjukkan hasil uji secara simultan bahwa kunjungan wisatawan dan hunian kamar hotel berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung sedangkan jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Baung.

Penelitian yang dilakukan oleh Nani Sari dkk, dengan judul penelitian Faktor-faktor yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Morowali”, secara orientasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pembangunan, jumlah penduduk yang produktif dan PDRB terhadap PAD Kabupaten Morowali, penelitian ini menggunakan sampel data dari tahun 2003-2012 dengan metode deskriptif dan dengan hasil kesimpulan secara parsial jumlah penduduk produktif

dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah sedangkan pengeluaran pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali.

G. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas, untuk mencari pengaruh variabel Pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap PAD maka digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.

H. Hipotesis Penelitian

Untuk menilai sejauh mana pembangunan bidang ekonomi yang telah dilaksanakan maka sangat diperlukan adanya alat untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan tersebut. Pendapatan regional adalah suatu indikator berupa data agregat yang sampai saat ini banyak negara termasuk Indonesia masih memakai data tersebut untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, baik secara nasional maupun regional. PDRB merupakan data statistik untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan ekonomi baik di masa lalu maupun

sekarang dan sebagai evaluasi, perencanaan, dan sasaran yang akan dicapai masa mendatang.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh produk barang dan jasa serta hasil kegiatan ekonomi yang diproduksi di wilayah domestik tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk regional tersebut. Dalam PDRB diperlukan untuk mengetahui : (a) Pertumbuhan ekonomi regional maupun sektoral, laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi, (b) Tingkat kemakmuran suatu daerah, tinggi rendahnya tingkat kemakmuran suatu daerah biasanya diukur dengan besar kecilnya angka pendapatan per kapita. Angka ini diperoleh dan PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, (c) Tingkat perubahan harga secara keseluruhan (inflasi/deflasi), inflasi atau deflasi merupakan gambaran tentang terjadinya perubahan harga. Jika terjadi fluktuasi harga yang tidak menentu akan sangat berpengaruh terhadap daya beli konsumen, sebaliknya terjadinya deflasi terus-menerus menimbulkan resesi ekonomi. penyajian pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan.

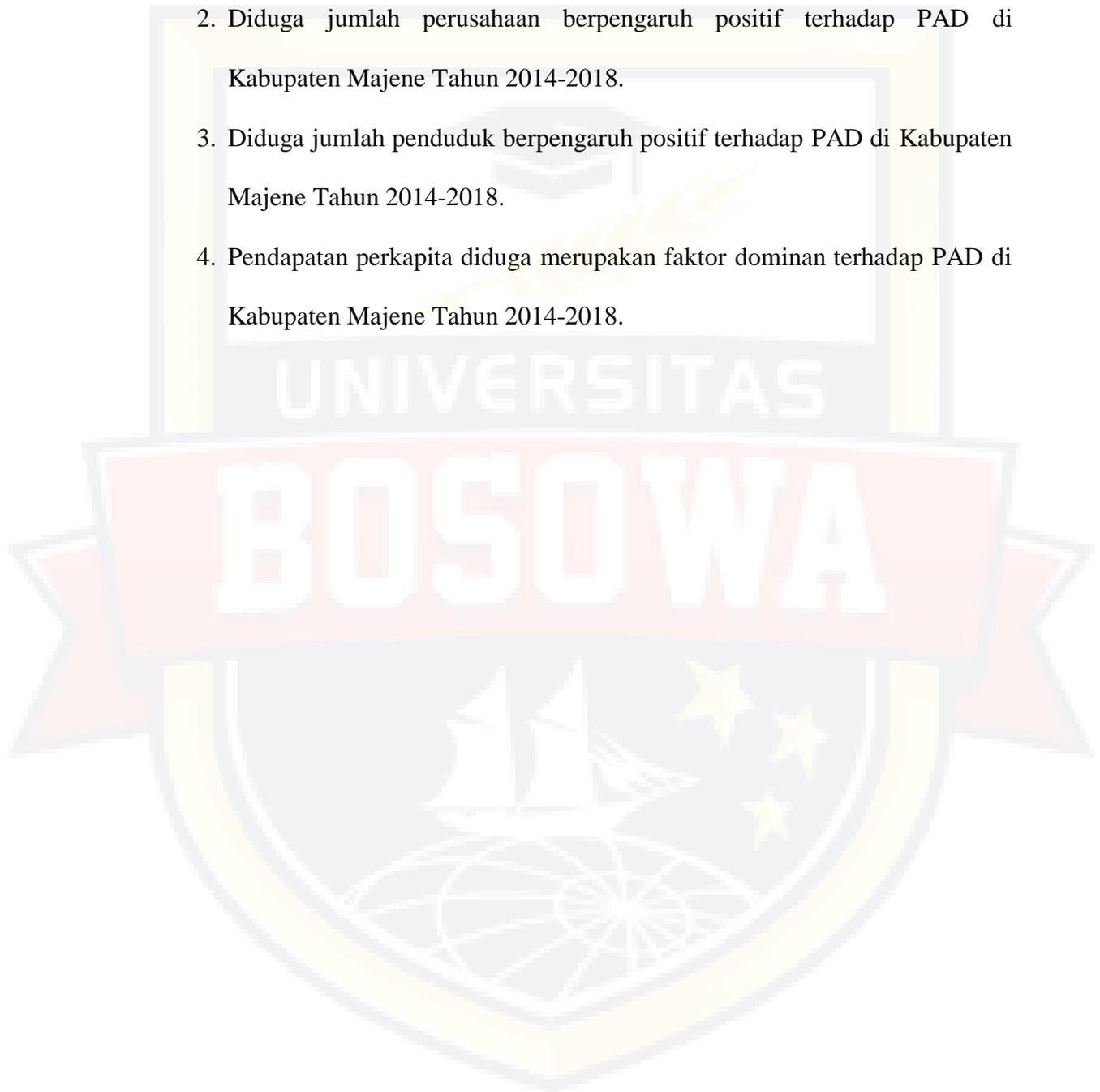
Penerimaan daerah perlu terus diupayakan dengan peningkatan adanya penggalan potensi sumber-sumber dana yang ada sehingga dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat kuantitas dan kualitasnya. Upaya perbaikan sangat diperlukan terutama di bidang pengelolaan keuangan daerah. Berbagai kebijakan tentang keuangan daerah diarahkan agar daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kemampuannya dalam membiayai penyelenggaraan urusannya

sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan diberikannya kewenangan oleh pemerintah pusat berupa kewenangan yang kuat, nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional. Untuk mempercepat tercapainya kemandirian tersebut maka diharapkan kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Majene. Dengan demikian daerah juga perlu membuka pangsa pasar domestik dan internasional yang baru dan ikut meningkatkan hasil produk/olahan perusahaan sesuai dengan standar yang dibutuhkan konsumen. Dengan kualitas dan kuantitas yang tinggi produk yang dihasilkan maka pangsa pasar akan lebih luas dengan demikian maka perusahaan tersebut dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PAD.

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Alasannya sederhana, karena penduduk merupakan sumber daya manusia yang partisipasinya sangat diperlukan agar pelaksanaan hasil-hasil perencanaan dapat berjalan dengan baik. Penduduk juga merupakan motor penggerak pembangunan, juga dapat bertindak sebagai obyek, dimana ia akan menjadi salah target dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, analisis kependudukan sangat mendukung efisiensi dan efektifitas perencanaan pembangunan agar berhasil sebagaimana diharapkan.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban sementara atas masalah yang dirumuskan Menurut Sugiyono (2014: 132). Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.
2. Diduga jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.
3. Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.
4. Pendapatan perkapita diduga merupakan faktor dominan terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian pada lokasi tersebut yaitu :

1. Hingga kini ini belum pernah ada penelitian di Kabupaten Majene yang meneliti judul penelitian ini.
2. Rumusan masalah yang ditetapkan peneliti sangat sesuai dengan kondisi daerah saat ini.
3. Lokasi penelitian tersebut terjangkau oleh peneliti sehingga dapat mempercepat proses penyelesaian penelitian.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan, dengan rincian kegiatan, yaitu:

1. Mengurus izin penelitian pada instansi yang terkait serta mengonfirmasi untuk melakukan penelitian.
2. Peneliti mengumpulkan data-data primer dan sekunder.
3. Peneliti melakukan olah data dengan bantuan *SPSS 24*.
4. Peneliti melakukan penyusunan hasil penelitian.

B. Desain dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan ini adalah kausal merupakan tipe konklusif berstruktur dan sistematis yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab-akibat (hubungan kausal) dari suatu fenomena mengenai situasi yang ada

dengan cara mengamati antara variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara serentak pada individu-individu dari suatu populasi pada satu saat (Murti, B 2003). Dilakukan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penggalan data berdasarkan data sekunder dan pada waktu berurutan (*times series*) tahun 2014-2018 selanjutnya dilakukan pengujian atas data. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda, dengan membuat hipotesa dan asumsi klasik untuk memperoleh fungsi linier yang terbaik dan parameter tidak bias.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dengan pengumpulan bahan-bahan yang dipelajari dan digali dari buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan daerah yang diharapkan dapat mendukung dengan permasalahan atau obyek yang diteliti. Disamping itu peneliti mengakses situs ww.majenekab.bps.go.id

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang mendukung penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Adapun teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Analisis Deskriptif

Sugiyono (2012:147) menyebutkan bahwa teknik analisis data pada penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Dalam penelitian ini analisis data akan menggunakan teknik statistik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:148) statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

2. Analisis Kuantitatif

Metode analisis ini merupakan metode analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil jawaban kuesioner. Pada dasarnya data penelitian ini adalah kualitatif, namun agar dapat dianalisis dengan menggunakan analisis statistik, maka data kualitatif tersebut dikuantitatifkan sehingga hasil yang diperoleh diharapkan memberi gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari kenyataan. Analisis kuantitatif dalam penelitian ini menggunakan analisis :

a. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2013) menyatakan Uji Multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), cara mendeteksi terhadap adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah sebagai berikut :

- a. Besarnya *variabel inflation factor* / VIF pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu nilai $VIF < 10$.

- b. Besarnya toleransi pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas yaitu $tolerance > 0,10$.

2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Kebanyakan data cross section mengandung situasi heterokedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar), Ghozali (2013).

Uji heterokedastisitas akan dilakukan dengan metode Uji Glejser. Duwi Priyatno (2016) menyatakan *Uji Glejser* yaitu meregresikan absolute residual dengan masing-masing variabel independen. Jika pada uji t nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3. Uji Normalitas

Ghozali, (2013) menyatakan Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi

normal. Uji normalitas dilakukan dengan uji statistic, dengan cara melihat nilai kurtosis dan skewness dari residual. Metode ini disebut juga uji *kolmogorov smirnov*, adapun kriteria sebagai berikut :

- a. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal.
- b. Jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal.

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda menurut Sugiyono (2012) digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis regresi berganda diolah dengan melalui program statistik SPSS 25 *for windows*. Dengan menggunakan regresi akan diperoleh nilai koefisien regresi yang digunakan untuk menuliskan persamaan regresinya. Dari persamaan regresi tersebut akan diketahui pengaruh dari variabel bebas (*independent variable*) terhadap variabel terikatnya (*dependent variable*).

Dengan teori sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y	=	Variabel Pendapatan Asli Daerah
A	=	Konstanta
b ₁	=	Koefisien Regresi Variabel Pendapatan Perkapita
b ₂	=	Koefisien Regresi Variabel Jumlah Perusahaan
b ₃	=	Koefisien Regresi Variabel Jumlah Penduduk
X ₁	=	Variabel Pendapatan Perkapita

X2	=	Variabel Jumlah Perusahaan
X3	=	Variabel Jumlah Penduduk
E	=	Variabel Lain Diluar Penelitian

c. Pengujian Hipotesis

1) Analisis Parsial (Uji T)

Secara parsial, pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghozali (2013) “uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen”. Adapun kriteria pengujian Uji T adalah sebagai berikut :

- a. Jika tingkat signifikansi $< 0,05$ dan $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima, hal ini berarti bahwa ada pengaruh positif dan signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
- b. Jika tingkat signifikansi $> 0,05$ dan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ maka H_a ditolak dan H_0 diterima, hal ini berarti bahwa tidak ada pengaruh positif dan signifikan variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

2) Analisis Koefisien Determinasi

Menurut Ghozali (2015) ‘koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel independen’. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, sebaliknya nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi.

E. Definisi Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan total penerimaan PAD Kabupaten Majene tahun 2014-2018 yang diperoleh dari retribusi daerah, pajak daerah, laba BUMD dan Aset daerah dan lain-lain PAD yang sah; data dalam satuan miliaran rupiah pertahun.

2. Pendapatan Perkapita

Adalah PDRB berdasar atas harga konstan, semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga tetap yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan agregat pendapatan dari tahun ke tahun dinilai berdasarkan perkembangan produk riil dan bukan karena fluktuasi harga atau inflasi. Pendapatan perkapita diperoleh dari hasil bagi dari PDRB harga konstan dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dalam satuan jutaan rupiah pertahun.

3. Jumlah Perusahaan

Merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di wilayah Kabupaten Majene dalam waktu tahun 2014-2018, dalam satuan perusahaan pertahun.

4. Jumlah Penduduk

Total penduduk laki-laki dan perempuan dari segala umur yang menetap di wilayah kabupten Majene; dalam satuan jiwa pertahun.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Berdasarkan bentuk wilayah kabupaten sebagai wilayah daratan yang memanjang dari selatan ke utara, tentunya akan berimplikasi terhadap kebijakan dan program pembangunan serta konsep penataan ruangnya secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengembangan kawasan dan kegiatan pembangunan harus dapat ditunjang dengan diselaraskan dengan bentuk dan aksesibilitas kawasan terhadap pusat-pusat pengembangan. Perencanaan kawasan pesisir dan wilayah daratan tidak hanya dipandang sebagai suatu perencanaan kawasan yang berbatasan langsung dengan laut, sehingga laut dianggap sebagai pembatas (*constrain*) dalam dinamika perkembangannya.

Tinjauan terhadap karakteristik wilayah, merupakan langkah awal dalam melakukan suatu perencanaan, dimana data mengenai aspek fisik dasar Kabupaten Majene terdiri atas; letak geomorfologi, jenis tanah, hidrologi, geologi, topografi dan kelerengan, iklim dan curah hujan, serta penggunaan Lahan.

Secara geografis Kabupaten Majene terletak antara 200 38' 45" – 300 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" - 1190 4' 45" Bujur Timur. Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 5 kabupaten yang berada dalam wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Jarak Kabupaten Majene ke ibu kota Kabupaten Propinsi Sulawesi Barat (Kabupaten Mamuju) kurang lebih 146 km.

Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat 16.990,77 Km², terdiri atas 8 kecamatan dan 20 Kelurahan serta 62 desa. Adapun kecamatan di Kabupaten Majene adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda. Pada dasarnya wilayah Kabupaten Majene sangat berpengaruh terhadap daerah sekitarnya ini dapat dilihat dari letak Kabupaten Majene secara administratif.

Secara administratif Kabupaten Majene berbatasan dengan wilayah-wilayah berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Polewali Mandar dan Mamasa.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km² atau 19,81%, sedangkan wilayah kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Banggae dan Banggae Timur, dengan luas wilayah masing-masing adalah Kecamatan Banggae 25,15 km² atau 2,65% dan Kecamatan Banggae Timur 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Majene yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan prima. Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majene dalam Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang sah.

Keungan Daerah sebagaimana tercermin dalam APBD tersebut, terlihat bahwa PAD merupakan indikator utama dalam menilai tingkat kemampuan keungan suatu daerah otonom. Bertitik tolak dan menyadari pentingnya PAD dalam struktur maupun pengeluaran dalam APBD dan juga merupakan tolak ukur terpenting bagi kemampuan daerah dalam perwujudan Otonomi Daerah. Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Majene, menyusun buku profil, dimana buku profil ini menggambarkan potret PAD Kabupaten Majene maupun pengelolaanya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pemerintah bantuan dalam pengelolaan pendapatan daerah.
- b. Fungsi : (a) Perumusan dan Pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang penerimaan dan Pendapatan Daerah; (b) Pelaksanaan Pendataan, penilaian, penetapan, penagihan dan Pengawasan Pajak dan retribusi daerah; (c) Penyusunan rencana penerimaan dan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil; (d) Penyusunan dan pelaksanaan pengembangan potensi pajak dan retribusi daerah.

2. Visi dan Misi

- a. Visi sebagai berikut :

“Menjadi OPD terdepan dalam inovasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah”.

- b. Misi Sebagai berikut:

“Mewujudkan pendapatan yang optimal dan mampu meningkatkan produktifitas rakyat”. Dengan pelayanan prima dan pemerintah yang entrepreneur pendapatan daerah dapat tercapai maksimal setiap tahunnya.

3. Sumber-Sumber PAD

- a. Pajak Daerah

- b. Jumlah Perusahaan
 - c. Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya
 - d. Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
 - e. Dana Perimbangan : (a) Bagi Hasil Pajak; (b) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (c) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh21).
4. Susunan Organisasi
- a. Kepala Badan
 - b. Sekertariat
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiaan
 - 3) Sub Bagian Keuangan
 - c. Bidang Pengkajian Pengembangan dan Evaluasi
 - 1) Sub Bidang Pengkajian dan Perundang-Undangan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Potensi
 - 3) Sub Bidang Perencanaa dan Evaluasi
 - d. Bidang Informasi Pendapatan dan Penetapan
 - 1) Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi
 - 2) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendapatan
 - 3) Sub Bidang Penilaian dan Penetapan
 - e. Bidan Penagihan Pengawasan dan Keberatan
 - 1) Sub Bidang Penagihan
 - 2) Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian

3) Sub Bidang Keberatan

f. Bidang Pendapatan Non PAD dan Pelaporan

1) Sub Bidang Pendapatan Non PAD

2) Sub Bidang Verifikasi Benda Berharga

3) Sub Bidang Pelaporan

B. Deskripsi Data Variabel**1. Variabel Penerimaan PAD**

Variabel PAD pada penelitian ini diartikan sebagai penerimaan PAD Badan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene tahun 2014-2018. Pengukuran variabel penerima PAD dinyatakan dalam jumlah rupiah pertahun.

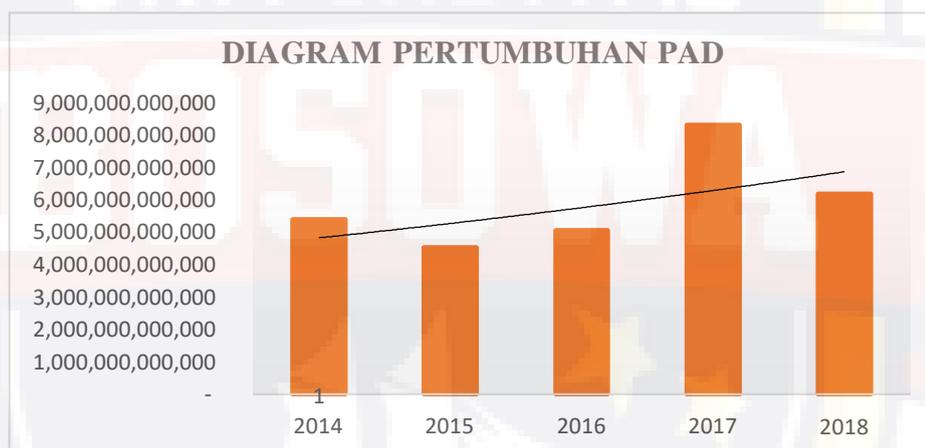
Tabel 4.1 Pertumbuhan PAD Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	Pertumbuhan (%)
2014	53.921.491.920,68	-
2015	45.231.988.393,56	-16,12
2016	50.544.269.254,29	11,75
2017	83.238.103.847,80	64,70
2018	61.813.947.197,07	-25,74
Rata-Rata	7.892.455.276,39	8,65

Sumber : BAPENDA Kab. Majene 2020

Tabel 4.1 menunjukkan hasil penelitian diporelah data mengenai pertumbuhan PAD yang diterima Kantor BPAD tahun 2014-2018,

anggaran pendapatan Pemerintah ditahun 2015 menurun dan meningkat kembali di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan kembali menurun di tahun 2018. Hal ini juga menunjukkan rata-rata realisasi PAD sebesar Rp. 7.892.455.276,39 dengan pertumbuhan rata-rata 8,65%. Pertumbuhan tertinggi 64,70% pada tahun 2017, sedangkan pertumbuhan terendah -25,74% pada tahun 2018. Hal ini belum dapat menjelaskan apakah pertumbuhan PAD menunjukkan hasil yang baik atau malah sebaliknya pada pemerintah Kab. Majene.



Gambar 4.1 Diagram Garis Pertumbuhan PAD.

Sumber : Data Sekunder Diolah, BPAD Kab, Majene 2020

Gambar diatas menunjukkan pertumbuhan PAD selama tahun 2014-2018 sangat bervariasi, mengalami pertumbuhan sangat kecil pada tahun 2015 dan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2017.

2. Variabel Pendapatan Perkapita

Salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah adalah PDRB per kapita. Besarnya pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Nilai PDRB per kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dengan demikian besarnya penduduk suatu daerah sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan per kapita daerah tersebut. Dengan perhitungan bahwa PDRB berdasarkan harga konstan dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majene tahun 2014-2018.

Table 4.2 Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita

Tahun	Pengeluaran Perkapita	Pertumbuhan (%)
2014	12.368,048	-
2015	13.648,150	8,12%
2016	14.757,581	5,65%
2017	15.592, 691	6,48%
2018	16.603,173	6,10%
Rata-Rata	4.235,125	6,58%

Sumber : BPS Kab. Majene

Table 4.2 menunjukkan hasil penelitian diperoleh data dengan pertumbuhan sangat bervariasi. Dengan nilai pertumbuhan terendah

sebesar 5,65% pada tahun 2016 dan tertinggi sebesar 6,48% pada tahun 2003.



Gambar 4.2 Diagram Garis Pertumbuhan Pengeluaran Perkapita.

Sumber : Data sekunder diolah, BPS Kab. Majene 2020

Gambar diatas menunjukkan pertumbuhan pengeluaran perkapita selama tahun 2014-2018 sangat bervariasi, mengalami pertumbuhan rendah pada tahun 2014. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 juga merupakan pertumbuhan tertinggi pada jumlah perusahaan karena banyak pembangunan perusahaan/pabrik baru.

3. Variabel Jumlah Perusahaan

Variabel Jumlah Perusahaan dalam penelitian ini diartikan sebagai jumlah perusahaan selama tahun 2014-2018. Data sekunder diperoleh dari BPS Kabupaten Majene pada tahun 2020. Pengukuran jumlah perusahaan dinyatakan dalam perusahaan pertahun.

Table 4.3 Pertumbuhan Jumlah Perusahaan

Tahun	Jumlah Perusahaan	Pertumbuhan (%)
2014	117	-
2015	119	1,70
2016	393	230,25
2017	465	18,32
2018	453	-2,58
Rata-Rata	84	61,92

Sumber : BPS Kab. Majene, 2020

Pada tabel 4.3 menunjukkan, berdasarkan hasil penelitian diperoleh data mengenai jumlah perusahaan yang bersumber dari BPS Kabupaten Majene selama tahun 2014-2018 didapatkan pertumbuhan jumlah pertumbuhan sangat bervariasi. Dengan nilai pertumbuhan terendah (negatif) -2,58% pada tahun 2018 dan tertinggi 230,25%, pada tahun 2016.



Gambar 4.3 Diagram Garis Pertumbuhan Perusahaan

Sumber : Data skunder diolah, BPS Kab, Majene 2020

Gambar diatas menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan dari tahun 2014-2018 sangat bervariasi, kembali mengalami pertumbuhan paling kecil (negatif) pada tahun 2014 dan 2015 dan mengalami pertumbuhan tinggi yang mencapai puncak pada tahun 2017 selama 5 (lima) tahun terakhir.

4. Variabel Jumlah Penduduk

Variabel Jumlah Penduduk dalam penelitian ini diartikan sebagai total sejumlah warga negara Indonesia maupun warga negara asing bertempat tinggal tetap di dalam wilayah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengukuran jumlah penduduk dinyatakan dalam jumlah jiwa pertahun.

Tabel 4.4 Pertumbuhan Jumlah Penduduk

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
2014	161.132	-
2015	163.896	0,76
2016	166.397	1,52
2017	169.072	1,60
2018	171.272	1,30
Rata-Rata	10.140	1,29

Sumber : BPS Kab. Majene, 2020

Tabel 4.4 menunjukkan hasil penelitian diperoleh data mengenai pertumbuhan penduduk pada kantor Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014-2018, dengan nilai pertumbuhan terendah 0,76% pada tahun 2015. Pertumbuhan tertinggi 1,60% pada tahun 2017.



Gambar 4.4 Diagram Garis Pertumbuhan Penduduk

Sumber : Data skunder diolah, BPS Kab. Majene 2020

Gambar diagram garis diatas menunjukkan pertumbuhan penduduk selama tahun 2014-2018 bervariasi, mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2018 dan pertumbuhan terendah di tahun 2014.

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

Ghozali (2013) menyatakan uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan dengan cara dengan melihat VIF (Variance Inflation Factors) dan nilai tolerance. Jika tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak terjadi korelasi sempurna antara variabel independen dan sebaliknya. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF	Keterangan
Pendapatan Perkapita	0,217	8.137	Non Multikol
Jumlah perusahaan	0,118	8.449	Non Multikol
Jumlah penduduk	0,313	7.305	Non Multikol

Sumber : Hasil analisis data SPSS 25, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa angka tolerance dari variabel independen semuanya menunjukkan angka $> 0,10$, hal ini berarti bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Kemudian angka variabel inflation factor (VIF) tidak ada satupun dari variabel independen yang menunjukkan angka > 10 . Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa dalam model regresi tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen tersebut.

2. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas diuji dengan menggunakan uji glejser, dengan meregresikan absolute residual dengan masing-masing variabel independen. Dengan ketentuan jika hasil uji jika hasil uji-t nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Tabel 4.6
Hasil Uji Glejser
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4105.867	2558.871		-1.605	.355
	Pendapatan_Perkapita	-5.189	4.032	-4.800	-1.287	.421
	Jumlah_Perusahaan	-.185	.145	-1.820	-1.280	.422
	Jumlah_Penduduk	29.914	18.900	6.852	1.583	.359

a. Dependent Variable: RESIDUAL_PAD

Sumber : Hasil analisis data SPSS 25, 2021

Dari hasil analisis dengan melakukan uji glejser dapat diketahui bahwa nilai signifikansi masing-masing variabel independen telah berada diatas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas antar variabel dalam model regresi.

3. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model yang berdistribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan cara melihat nilai kurtosis dan skewness

dari residual. Metode ini disebut juga uji *kolmogorov smirnov*, dengan kriteria jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data dinyatakan tidak berdistribusi normal, sedangkan jika hasil pengujian menunjukkan nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi normal. Adapun hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.7
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen/Dependen	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pendapatan Perkapita	0,200	Non Multikol
Jumlah perusahaan	0,200	Non Multikol
Jumlah penduduk	0,200	Non Multikol
Pendapatan Asli Daerah	0,200	Non Multikol

Sumber : Hasil analisis data SPSS 25, 2021

Dari hasil uji multikolinearitas dapat diketahui bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada masing-masing variabel dependen maupun independen, sehingga salah satu syarat uji asumsi klasik terpenuhi.

D. Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majene menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Teknik ini digunakan untuk meramalkan pengaruh dua variabel atau lebih variabel bebas (X) terhadap sebuah variabel terikat (Y) atau untuk membuktikan bahwa terdapat atau tidak terdapatnya hubungan antara dua variabel atau lebih variabel bebas dengan sebuah variabel terikat.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan persamaan regresi linear sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda tersebut dapat diuraikan bahwa :

1. Nilai konstanta sebesar -2,577 menyatakan bahwa jika variabel independen pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk tidak ada, maka pendapatan asli daerah akan turun sebesar 2,577 satuan.
2. Nilai koefisien pendapatan perkapita sebesar 3,530 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1 skor pendapatan perkapita, maka akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 3,530 satuan.
3. Nilai koefisien jumlah perusahaan sebesar 1,095 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1 skor jumlah perusahaan, maka akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1,095 satuan.
4. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 2,37 berarti bahwa setiap terjadi kenaikan 1 skor jumlah penduduk, maka akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 0,380 satuan.

E. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis secara parsial digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial, apakah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap variabel dependen Model hipotesis dalam penelitian ini adalah dua arah, dengan t-tabel 2,015 signifikansi 0,05.

Tabel 4.8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-2.577	9.384		-1.518	.371
	Pendapatan_Perkapita	3.530	5.999	4.891	4.674	.003
	Jumlah_Perusahaan	1.095	.933	1.114	2.102	.005
	Jumlah_Penduduk	2.374	1.862	5.352	2.579	.009

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

Sumber : Hasil analisis data SPSS 25, 2021

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independen pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk secara parsial terhadap variabel dependen pendapatan asli daerah, dapat dilakukan dengan cara melihat t -hitung $>$ t -tabel (2,015) dan $\alpha \leq 0,05$. Hasilnya dapat dilihat pada pengujian hipotesis dibawah ini :

1. Pengujian Hipotesis 1

Hipotesis pertama dinyatakan bahwa diduga pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Dari hasil pengujian terhadap variabel pendapatan perkapita menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur (B) sebesar 3,530 kemudian nilai t -hitung sebesar $4,674 > t$ -tabel 2,018 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan

asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Dengan demikian hipotesis pertama dinyatakan dapat diterima.

2. Pengujian Hipotesis 2

Hipotesis kedua dinyatakan bahwa diduga jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Hasil pengujian terhadap variabel jumlah perusahaan menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur (B) sebesar 1,095 kemudian nilai t -hitung sebesar $2,102 < t$ -tabel $2,018$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,005 < 0,05$.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Dengan demikian hipotesis kedua dinyatakan dapat diterima.

3. Pengujian Hipotesis 3

Hipotesis ketiga dinyatakan Diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Hasil pengujian terhadap variabel jumlah penduduk menunjukkan bahwa nilai koefisien jalur (B) sebesar 2,374 kemudian nilai t -hitung sebesar $2,579 > t$ -tabel $2,018$ dengan tingkat signifikansi sebesar $0,009 < 0,05$.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Dengan demikian hipotesis ketiga dinyatakan dapat diterima kebenarannya.

4. Pengujian Hipotesis 4

Hipotesis keempat dinyatakan Pendapatan perkapita diduga merupakan faktor dominan terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa nilai *Unstandardized Coefficients* (b) yang paling tinggi diantara ketiga variabel yakni variabel pendapatan perkapita yang mencapai 3,530, sehingga diasumsikan memberikan pengaruh paling besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten majene tahun 2014-2018.

Kesimpulan dari hasil pengujian menunjukkan bahwa pendapatan perkapita merupakan faktor yang paling dominan dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Dengan demikian hipotesis keempat dinyatakan dapat diterima.

F. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk menerangkan seberapa besar pengaruh dari seluruh variabel independen pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk terhadap variabel dependen pendapatan perkapita Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.853	.413	113.561	2.952

a. Predictors: (Constant), Jumlah_Penduduk, Jumlah_Perusahaan, Pendapatan_Perkapita

b. Dependent Variable: Pendapatan_Aslis_Daerah

Tabel diatas menunjukkan bahwa hasil pengujian R-Square adalah 0,853. Nilai tersebut menunjukkan bahwa faktor pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk adalah sebesar 85,3 %, sedangkan sisanya 14,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Angka R sebesar 924^a menggambarkan korelasi atau hubungan variabel terikat dengan variabel bebas artinya adanya hubungan yang positif dan erat antara pendapatan perkapita, jumlah perusahaan dan jumlah penduduk dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018 sebesar 92,4 %.

G. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018

Pendapatan perkapita sebagai jumlah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Dengan perhitungan bahwa PDRB

berdasarkan harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Setiap terjadi kenaikan 1 skor pendapatan perkapita, maka akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 3,530 satuan. Pertumbuhan positif pendapatan perkapita dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Majene.

Berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pendapatan Asli Daerah, yang disebut pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu sumber pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang nomor 33 tahun 2004 adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan perkapita mampu berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene, hal ini sesuai pernyataan para ahli ekonomi seperti Adolf Wagner dalam Amiruddin (2016) mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan ikut meningkat, Wagner menjelaskan peranan pemerintah yang semakin besar karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum pendidikan, kebudayaan dan sebagainya,

Pada tahun 2014-2018 pertumbuhan pendapatan (pengeluaran) perkapita tertinggi pada tahun 2018 dan terendah pada tahun 2014 dengan nilai rata-rata 5 tahun terakhir mencapai Rp. 4.234.125,- . Secara *year on year* pendapatan perkapita tumbuh dalam 5 tahun terakhir sehingga mampu berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Semakin besar nilai pendapatan perkapita pada suatu daerah, diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik Tahun 2014-2015 bahwa Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran dan Daerah 2014-2015, pada tahun 2014 pengeluaran perkapita di kota maupun di desa mencapai 479.773 kemudian di tahun 2015 meningkat menjadi 563.345. Pertumbuhan positif ini mengindikasikan bahwa pendapatan perkapita masyarakat majene mengalami peningkatan signifikan demikian juga kesejahteraannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan pernyataan ahli bahwa salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (Sidik, 2002). Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti Penelitian Pidelis, dkk (2016) menemukan bahwa Pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013.

2. Pengaruh Jumlah Perusahaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018

Jumlah perusahaan merupakan sekumpulan perusahaan-perusahaan swasta yang berdiri di wilayah Kabupaten Majene dalam waktu tahun 2014-2018, dalam satuan perusahaan pertahun. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Setiap terjadi kenaikan 1 skor jumlah perusahaan, maka akan diikuti oleh kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 1,095 satuan. Semakin banyak jumlah perusahaan yang berdiri di Kabupaten Majene maka akan menambah kontribusi pajak ke Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Kontribusi jumlah perusahaan terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat dari peningkatan pendapatan asli daerah secara 5 tahun terakhir, sektor perusahaan tentunya memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak daerah secara berkala, semakin banyak jumlah perusahaan maka akan menyerap lapangan kerja bagi masyarakat sebagai subyek pajak sehingga membangun rantai positif bagi pendapatan asli daerah berkelanjutan.

Perekonomian di Kabupaten Majene dikategorikan berkembang karena telah memproduksi barang dan jasa untuk mensuplai kebutuhan penduduk. Adanya perusahaan di suatu wilayah dapat membantu menaikkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh daerah tersebut.

Perusahaan yang berada di suatu daerah dapat menyediakan modal, teknologi serta tenaga kerja dimana perusahaan tersebut beroperasi. Operasinya membantu menambah barang dan jasa yang diproduksi didalam daerah, menambah penggunaan tenaga kerja dan pendapatan serta menambah ekspor. Operasi perusahaan multinasional merupakan bagian yang cukup penting kegiatan ekonomi suatu daerah dan nilai produksi yang disumbangkan dalam perhitungan pendapatan daerah.

Perusahaan di Kabupaten Majene dapat dikategorikan dalam 2 sektor yaitu Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Swasta. Pemerintah daerah juga mendapatkan pendapatan lain dari laba Badan Usaha Milik Daerah BUMD yang dimiliki. Bagian laba Badan Usaha Milik Daerah adalah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha. Dari sektor badan usaha milik swasta pemerintah daerah Kabupaten Majene mendapatkan pendapatan asli daerah dari pajak yang dibayarkan. Demikian juga perusahaan mendapatkan retribusi daerah dimana berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 yang disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti Pidelis, dkk (2016) membuktikan Jumlah perusahaan berpengaruh positif terhadap PAD di kabupaten Nabire Papua tahun 2004-2013. Selain

itu Nia Safitri (2018) menemukan ketika terjadi peningkatan pada jumlah Industri akan menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten. Demikian juga penelitian Lokang (2016) Jumlah perusahaan (lnJPR) signifikan (berpengaruh positif) terhadap pendapatan asli daerah (lnPAD) di Jawa Tengah.

3. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018

Jumlah Penduduk adalah total penduduk laki-laki dan perempuan dari segala umur yang menetap di wilayah kabupten Majene; dalam satuan jiwa pertahun. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan yang ditarik dari subyek pajak (penduduk) secara berkesinambungan. Hasil ini sesuai pernyataan Norfidwitya dalam Lokang (2016) menyampaikan besar maupun kecilnya pendapatan dapat di pengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang diterima akan meningkat.

Faktor-faktor Demografi (Kependudukan) Faktor kependudukan yang dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga adalah jumlah penduduk dan komposisi penduduk. Seiring dengan jumlah penduduk yang semakin banyak maka pengeluaran konsumsi rumah tangga juga semakin banyak meskipun pengeluaran rata-rata orang atau perkeluarga

lebih rendah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga suatu negara akan sangat besar bila jumlah penduduk sangat banyak dan jumlah pengeluaran perkapita tinggi. Sebaliknya, pengeluaran konsumsi rumah tangga sedikit bila jumlah penduduk sedikit pula.

Semakin banyak penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) maka semakin besar tingkat konsumsi. Hal ini terjadi karena banyaknya jumlah penduduk yang bekerja maka pendapatanpun akan semakin besar. Apabila banyak penduduk yang tinggal diwilayah perkotaan, pengeluaran konsumsi juga makin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibanding masyarakat pedesaan.

Teori Peacock dan Wiseman yang merupakan salah satu Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah, dimana teori ini memandang bahwa pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari pemungutan suara. Mereka percaya bahwa masyarakat mempunyai tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka memiliki kesediaan untuk membayar pajak, Sadono (2012).

Pertumbuhan penduduk secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan meningkatkan tenaga kerja produktif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestiknya.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian terdahulu seperti penelitian Mayza, dkk. (2015) membuktikan bahwa jumlah penduduk mampu mempengaruhi PAD. Putu Adhi Guna Wijaya dan Ni Nyoman Yuliarmi (2019), juga dalam penelitiannya menemukan bahwa jumlah penduduk juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kabupaten Badung. Demikian juga penelitian Nani Sari dkk (2013) menemukan bahwa jumlah penduduk yang produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Morowali.

Hasil penelitian ini ternyata bertentangan dengan hasil Penelitian Demitianus (2018), ia justru menemukan bahwa jumlah penduduk memiliki pengaruh yang negatif terhadap PAD, jumlah penduduk meningkat maka PAD akan mengalami penurunan.

4. Pendapatan Perkapita merupakan faktor dominan terhadap PAD di Kabupaten Majene Tahun 2014-2018

Besarnya pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Hasil analisis regresi menunjukkan diantara ketiga variabel faktor pendapatan asli daerah, variabel pendapatan perkapita memiliki unstandardized coefficients yang

mencapai 3,530, sehingga diasumsikan memberikan pengaruh paling besar terhadap pendapatan asli daerah kabupaten majene tahun 2014-2018.

Besarnya pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Selanjutnya kesejahteraan penduduk yang meningkat akan menumbuhkan pendapatan per kapita di Kabupaten Majene.

Pendapatan perkapita Kabupaten Majene mengalami peningkatan dari tahun 2014 ke tahun 2016, pendapatan tertinggi pada tahun 2018 dan pendapatan terendah pada tahun 2014. Laju pertumbuhan pendapatan perkapita menunjukkan trend positif dalam 4 tahun terakhir, trend positif ini tentunya mendukung pertumbuhan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018.

Nursafitra, dkk (2019) menjelaskan strategi peningkatan penerimaan PAD dapat dilakukan melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD. Intensifikasi adalah cara yang dilakukan untuk menambah jumlah penerimaan dari wajib pajak yang sudah terdaftar. Proses pelaksanaan intensifikasi dimulai dari pembinaan, sosialisasi peraturan terkait pajak daerah, pengawasan dan pemeriksaan sebagai kontrol terhadap wajib pajak. Sedangkan ekstensifikasi adalah kegiatan penambahan jumlah wajib pajak (sumber pajak) yang belum terdaftar.

Setidaknya, ada empat cara yang dilakukan dalam pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, diantaranya:

- a. Membentuk satuan tugas khusus intensifikasi dan ekstensifikasi pajak yang terintegrasi. dan bertanggungjawab dalam proses pelaksanaannya.
- b. Meningkatkan kompetensi petugas pajak daerah.
- c. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait.
- d. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya bagi wajib pajak daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukkan hal-hal berikut :

1. Pendapatan perkapita berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Pertumbuhan pendapatan perkapita dengan trend positif dapat meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah Kabupaten Majene.
2. Jumlah perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Semakin banyak jumlah perusahaan yang berdiri di Kabupaten Majene maka akan menambah kontribusi pajak ke Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
3. Jumlah penduduk berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan pendapatan yang ditarik dari subyek pajak (penduduk) secara berkesinambungan.
4. Pendapatan perkapita merupakan faktor yang paling dominan dalam berkontribusi meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Majene Tahun 2014-2018. Besarnya pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

Selanjutnya kesejahteraan penduduk yang meningkat akan menumbuhkan pendapatan per kapita di Kabupaten Majene

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan dalam menentukan kebijakan terkait dengan penerimaan PAD di Kabupaten Majene, Pemerintah Daerah, diantaranya:

1. Pendapatan perkapita terbukti berpengaruh terhadap PAD, semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ablity to pay*) berbagai pungutan-pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga pemerintah perlu meningkatkan produk domestik dengan menambah terobosan, usaha-usaha pada pertanian, industri, perbankan, jasa-jasa, perdagangan dan mengendalikan tingkat pertumbuhan.
2. Jumlah perusahaan terbukti berpengaruh terhadap PAD sehingga juga diperlukan adanya usaha dari pemerintah untuk membuka diri menerima investor luar, sehingga dapat meningkatkan PAD dari setiap perusahaan yang masuk di wilayah Kabupaten Majene.
3. Jumlah penduduk terbukti berpengaruh positif terhadap PAD sehingga tidak perlu ada kebijakan khusus terhadap pertumbuhan jumlah penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmurf, Makdalena F., Vikie A. Rimate, dan George M.V. Kawung. 2015. Pengaruh Pendapatan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol.15 No. 05, Hal 727-737.
- Amiruddin Idris. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Badan Pusat Statistik, 2019. "Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Majene Menurut Lapangan Usaha pada Tahun 2014-2018. BPS Majene.
- Demitianus Murib, Rosalina A.M. Koleangan, Krest D. Tolosang, 2018. Demitianus Murib Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendapatan Perkapita, Pdrb Terhadap PAD Di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18 No. 01 Tahun 2018.
- Ghozali, Imam (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jaya , Wihana Kirana. 2002. *Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro*. PPPEB UGM, Yogyakarta.
- Josef Riwu, Kaho. 2007. *Prospek Otonomi Daerah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Grafindo Prasada.
- Kusuma, Hendra. Desentralisasi Fisikal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, [S1], July 2016. ISSN 2303-0186. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jek/article/view/22735>. Date accessed: 28 nov 2019. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p01>.
- Lokang, Yustina Lastri (2016) Pengaruh Jumlah Perusahaan, Jumlah Penduduk Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1985-2014. S1 Thesis, Uajy.
- Mardiasmo. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2011.

- Murti, Bisma. 2003. *Prinsip dan Metode Riset Epidemiologi*. Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Nia Safitri. 2018. Peranan Sektor Industri Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Provinsi Banten Tahun 2011-2015, Skripsi Universitas Islam Indonesia Fakultas Ekonomi Yogyakarta.
- Nugraha, Yoga Nurdiana. 2019. Pelaksanaan Desentralisasi Fisikal Di Indonesia. www.kemendagri.go.id. Diakses pada 29 September 2019.
- Nursafitri, dkk. Strategi Peningkatan PAD Melalui Intesifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Enrekang. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Volume 5, No.1, Juni 2019. Pissn 2460-6162. Eissn 2527-6476. Journal.unhas.ac.id/indeks.php/jakpp.
- Nyoman, Suartha; Murjana Yasa, I Gst Wayana. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Migrasi Masuk Terhadap Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Bangunan Penduduk Asli Kota. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapung*, [S1], may 2017. ISSN 2303-0186. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jek/article/view/22735>. Date accessed : 28 nov 2019. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i01.p01>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pidelis Murib, Debby C. Rotinsulu, Dan Krest D. Tolosang. 2016. Pengaruh Pendapatan Perkapita, Jumlah Perusahaan Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Nabire Papua Tahun 2004-2013. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 01 Tahun 2016, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia.
- Prana, Rindani Rezki. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tebing Tinggi. *Jurnal Ilman*, Vol. 4, No. 1, Pebruari 2016. ISSN 2355-1488. Available at:

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/jek/article/view/22735>. Date accessed : 28 nov 2019. doi: <https://doi.org/10.24843/JEKT.2016.v09.i10.p10>.

Sidik, Machfud. 2002. "Optimalisasi Pajak daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah." Makalah dalam acara orasi ilmiah dengan tema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah" yang diselenggarakan oleh STIA LAN Bandung

Soeharno. 2006. *Teori Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Alfabeta.

Sukirno, Sadono. 1999. *Pengantar Teori Makroekonomi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sukirno, Sadono. 20014. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

LAMPIRAN

TABULASI DATA PENELITIAN

Tahun	Pendapatan_Perkapita	Jumlah_Perusahaan	Jumlah_Penduduk	Pendapatan_Asli_Daerah
2014	12.368,048	117	161.132	53.921.491.920,68
2015	13.648,150	119	163.896	45.231.988.393,56
2016	14.757,581	393	166.397	50.544.269.254,29
2017	15.592,691	465	169.072	83.238.103.847,80
2018	16.603,173	453	171.272	61.813.947.197,07

HASIL UJI MULTIKOLINEARITAS

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Pendapatan_Asli_Daerah
/METHOD=ENTER Pendapatan_Perkapita Jumlah_Perusahaan Jumlah_Penduduk.
    
```

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Coefficients Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-2.577	9.384		-1.518	.371		
	Pendapatan_Perkapita	3.530	5.999	4.891	4.674	.003	.217	8.137
	Jumlah_Perusahaan	1.095	.933	1.114	2.102	.005	.118	8.449
	Jumlah_Penduduk	2.374	1.862	5.352	2.579	.009	.313	7.305

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asli_Daerah

HASIL UJI HETEROKEDASTISITAS

REGRESSION

```

/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT RESIDUAL_PAD
/METHOD=ENTER Pendapatan_Perkapita Jumlah_Perusahaan Jumlah_Penduduk
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/SAVE RESID.
    
```

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	T	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	-4105.867	2558.871		-1.605	.355
	Pendapatan_Perkapita	-5.189	4.032	-4.800	-1.287	.421
	Jumlah_Perusahaan	-.185	.145	-1.820	-1.280	.422
	Jumlah_Penduduk	29.914	18.900	6.852	1.583	.359

a. Dependent Variable: RESIDUAL_PAD

Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	24.3799	64.2511	48.1667	15.69810	5
Std. Predicted Value	-1.515	1.025	.000	1.000	5
Standard Error of Predicted Value	13.849	17.305	15.712	1.269	5
Adjusted Predicted Value	10.4658	115.8659	69.8059	42.70926	5
Residual	-8.62672	10.88058	.00000	8.80602	5
Std. Residual	-.490	.618	.000	.500	5
Stud. Residual	-1.000	1.000	-.200	1.095	5
Deleted Residual	-94.75947	39.79400	-21.63915	55.72973	5
Stud. Deleted Residual	0
Mahal. Distance	1.673	3.062	2.400	.509	5
Cook's Distance	.405	6.987	2.130	2.741	5
Centered Leverage Value	.418	.765	.600	.127	5

a. Dependent Variable: RESIDUAL_PAD

UJI NORMALITAS

NPAR TESTS

/K-S (NORMAL)=Pendapatan_Perkapita Jumlah_Perusahaan Jumlah_Penduduk Pendapatan_Asli_Daerah
/MISSING ANALYSIS.

NPar Tests

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pendapatan_Perkapita	Jumlah_Perusahaan	Jumlah_Penduduk	Pendapatan_Asli_Daerah
N		5	5	5	5
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	145.40	309.40	166.00	587.80
	Std. Deviation	16.652	176.841	4.123	148.198
Most Extreme Differences	Absolute	.138	.282	.167	.238
	Positive	.114	.259	.167	.238
	Negative	-.138	-.282	-.167	-.180
Test Statistic		.138	.282	.167	.238
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200	.200	.200	.200

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

HASI ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA & UJI T

```

REGRESSION
/MISSING LISTWISE
/STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA
/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)
/NOORIGIN
/DEPENDENT Pendapatan_Asl_Daerah
/METHOD=ENTER Pendapatan_Perkapita Jumlah_Perusahaan Jumlah_Penduduk
/SCATTERPLOT=(*SRESID ,*ZPRED)
/RESIDUALS DURBIN
/SAVE RESID.
    
```

Regression

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.924 ^a	.853	.413	113.561	2.952

a. Predictors: (Constant), Jumlah_Penduduk, Jumlah_Perusahaan, Pendapatan_Perkapita

b. Dependent Variable: Pendapatan_Asl_Daerah

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	74954.721	3	24984.907	1.937	.476 ^b
	Residual	12896.079	1	12896.079		
	Total	87850.800	4			

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asl_Daerah

b. Predictors: (Constant), Jumlah_Penduduk, Jumlah_Perusahaan, Pendapatan_Perkapita

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2.577	9.384		-1.518	.371
	Pendapatan_Perkapita	3.530	5.999	4.891	4.674	.003
	Jumlah_Perusahaan	1.095	.933	1.114	2.102	.005
	Jumlah_Penduduk	2.374	1.862	5.352	2.579	.009

a. Dependent Variable: Pendapatan_Asl_Daerah